

**ANTROPOLOGI *JILBOOBS*: POLITIK IDENTITAS, *LIFE STYLE*, DAN
SYARI'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

SYARIEF HUSYEIN

NIM : 11370094

PEMBIMBING :

PROF. NOORHAIDI HASAN, M.PHIL, PH.D

NIP : 19711207 199503 1 002

**PROGRAM STUDI SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini menganalisis *fashion* (tren mode) *jilboobs* yang berkembang di Indonesia. *Jilboobs* adalah istilah gabungan dua kata, yaitu *jil* (jilbab) dan *boobs* (payudara), merujuk kepada wanita muslim yang berjilbab sekaligus berpakaian ketat yang menampakan lekuk dada mereka. Permasalahan *fashion jilboobs* menjadi ramai dibicarakan setelah MUI memfatwa haram model pakaian ini. Menggunakan kerangka penafsiran dari teori politik identitas, penelitian ini memperlihatkan bagaimana *jilboobs* berkemabang menjadi *life style* wanita muslim Indonesia. Berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung di lapangan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan *fashion jilboobs* tidak terlepas dari proses globalisasi dan modernisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Menurut masyarakat memiliki mobilitas tinggi, berpengetahuan luas, berpengalaman, dan rasional. Fase ini dikenal sebagai masyarakat industri, ditandai dengan melemahnya peran agama dalam memelihara tatanan sosial maupun sebagai sumber pengetahuan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan antropologis, menekankan pada sudut pandang pengalaman-pengalaman subyektif, ide-ide, dan tujuan-tujuan yang diinginkan individu ringkasnya dari sudut pandang 'makna' (*sinn*) perilaku religius (*Jilboobers*) itu sendiri. Sebagai wanita tampil cantik dan menarik secara fisik merupakan sebuah kewajaran. Bagaimana *Jilboobers* menegosiasikan antara *life style* mereka dengan syari'ah di tengah fatwa haram MUI syarat akan makna politis. Kemudian pada akhirnya melahirkan politik identitas tersendiri sebagai jawaban atas diskriminasi dan *stereotype* yang mereka rasakan. Politik identitas di sini mengarah kepada respon *Jilboobers* terhadap dominasi arus besar mengenai pemahaman jilbab syar'i yang syarat akan makna moralitas, sopan-santun, akhlak, dan tingkah laku wanita dalam relasi sosialnya.

Kata Kunci: *jilboobs*, politik identitas, negosiasi, *life style*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarief Husyein
NIM : 11370094
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Antropologi *Jilboobs*: Politik Identitas, *Life Style*, dan Syari'ah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Mei 2015



Syarief Husyein
Nim. 11370094



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A, M.Phil., Ph.D.

NIP. 197112071995031002

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Syarief Husyein
NIM : 11370094
Judul Skripsi : Antropogi *Jilboobs*: Politik Identitas, *Life Style*, dan Syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Mei 2015

Pembimbing

Prof. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D.

NIP. 197112071995031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2044/2015

Skripsi dengan Judul: **“ANTROPOLOGI *JILBOOBS*: POLITIK IDENTITAS, LIFE STYLE, DAN SYARI’AH”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syarief Husyein
NIM : 11370094
Telah di Munaqasyahkan pada : Selasa, 15 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A (97)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A, M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji I

Dr. H. Kamsi, MA
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman SW, MA
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāw	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*di akhir kata

Semua *tā' marbūṭah*ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karūmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- <u>o</u> -----	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
----- <u>i</u> -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- <u>u</u> -----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fatḥah	ditulis	<i>fā'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yāẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لننشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض أهلاسنّة	Ditulis Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
----------------------	--------------------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

last time never come back: hidup hanya sekali, jadilah yang kamu inginkan...



PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang Tuaku,
Yang bersusahpayah menyekolahkanku dengan biaya tidak sedikit
Untuk adik-adik dan kakakku,
yang selalu menjadi motivasi suksesku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul ‘Antropologi *Jilboobs*: Politik identitas, *Life Style*, dan Syari’ah’, Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Syafiq Hanafi, M.Ag, Selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum.
3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ,dan Dosen Penasehat Akademik penulis selama meniti ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga telah memberikan motivasi kepada penyusun.
4. Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Prodi Siyasa, yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

5. Siti Jahroh, S.HI, M.Si, dan Bapak R. Sunarya Selaku Sekertaris dan Staff TU Jurusan Siyasah, yang selalu mengingatkan penyusun akan skripsi dan sidang munaqosah.
6. Dr. Sri Wahyuni dan Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum, yang telah mengajarkan bagaimana cara berdebat, beretorika, dan berargumen, dan terima kasih banyak telah menjadi sosok orang tua bagi kami dalam Komunitas Pemerhati Konstitusi.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
8. Ayahanda Saibani Abdul Hamid, Ibunda Rodiah, dan Saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan untuk semua pengorbanannya memberikan yang terbaik serta keceriaan bagi penulis. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan dan kami senantiasa dapat membanggakan kalian.
9. Teman-teman Prodi Siyasah, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta sharing opini bersama, untuk mendiskusikan tabir keilmuan Politik dan Hukum, Teruntuk: Riza, Burhan, Rudi, Hasbi, Pakde Irul, Fandy, Cecep, Rizal yang secara khusus meminta namanya dituliskan dalam halaman ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan oleh Sang Pemilik Hidup.
10. Responden penelitian skripsi ini yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teruntuk: Andhani, Maylani, Fitri, Ledy, Ipeh, Khairani, Diana, Fhavi dan responden lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
11. Tim Debat Fakultas Syariah dan Hukum 2012-2014 yakni; Kak Wildan, Kamal, Irfan, Rifky, Maslul, Proborini, Hanum, Ifa Latifa, Basid, Wiwi, Rosi dan Torro, yang telah banyak memberikan pengalaman dan nilai-nilai berharga kepada penyusun. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia ini tidak berhenti pada ide saja, namun bisa terwujud dalam semangat dan tindakan nyata. ***“Lebih baik menjadi pragmatis***

untuk memeluk idealis, daripada memiliki idealis untuk menjadikan pragmatis, Salam Konstitusi !!”

12. Teman-teman HMMC (Honda Megapro Modif Community) Yogyakarta yang selalu ada dan siap di ajak Touring saat penulis jenuh, galau, dan stres mengerjakan skripsi. Kalian luar biasa, *sakduluran sak lawase*, salam satu aspal!

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 04 Mei 2015

Penyusun

Syarief Husyein

NIM. 11370094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JILBAB DI INDONESIA	17
A. Sekilas Tentang Jilbab di Indonesia	17
B. Tren <i>Jilboobs</i> di Indonesia	19
C. Fatwa MUI	23
BAB III <i>JILBOOBS</i> DAN MAHASISWI	27
A. Makna <i>Jilboobs</i> Bagi Mahasiswi	27

1. Penutup Aurat	27
2. Identitas Diri	30
3. <i>Self Defence</i>	32
4. <i>Fashion</i>	34
B. Pandangan <i>Jilboobers</i> Terhadap <i>Qiwama</i>	35
<i>Qiwama</i> Sebagai Landasan Doktrinal	38
C. Pandangan <i>Jilboobers</i> Terhadap Hijab <i>Syar'i</i>	41
<i>Jilboobs</i> dan Moralitas	44
BAB IV JILBOOBS: ANTARA FASHION DAN SYARI'AH	47
A. Faktor Makro Sosial dan Mikro Individual	47
1. Faktor Makro Sosial	48
a. Pendidikan dan Masyarakat Industri	49
b. <i>Adult Transition</i>	51
c. <i>Media and Entertainment</i>	52
2. Faktor Mikro Individual	53
B. Negosiasi Antara <i>Life Style</i> dan Syari'ah	55
C. Makna Politis dibalik <i>Fashion jilboobs</i>	60
D. Politik Identitas <i>Jilboobers</i>	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	70
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi 1998, Islamisasi membawa perubahan sosial di Indonesia. Islamisasi di Indonesia ditandai dengan jilbab sebagai alat perjuangan dalam rangka menumbangkan rezim Soeharto dan perlawanan terhadap *westernisasi*. Bagi orang barat, jilbab merupakan bentuk manipulasi perilaku wanita, sedangkan di Timur Tengah jilbab dinilai sebagai alat simbolis *stereotype* dan digunakan hanya ketika bertemu orang asing atau sebagai pekerja publik.¹ Jilbab dapat berfungsi sebagai alat komunikasi non verbal antara yang memakai dan orang yang melihat, yaitu mengkomunikasikan pesan seperti status perkawinan, pendidikan, dan tempat asal.² Fenomena jilbab di setiap negara memiliki ciri khas berbeda dipengaruhi oleh sistem budaya yang berkembang sejak lama.

Dewasa ini, fenomena yang berkembang mengenai dunia jilbab Indonesia adalah munculnya kelompok remaja yang menggunakan jilbab, namun juga mengenakan pakaian ketat. Hal tersebut menjadi gaya hidup (*life style*) dan *fashion* guna tampil cantik namun masih dalam koridor yang mereka anggap *syar'i*. Fenomena ini disebut *jilboobs*. Istilah *jilboobs*

¹ Richard Antoun, "On the Modesty of Women in Arab Muslim Villages", dalam Jurnal *American Anthropologist* 70, no. 4, 1968, hlm. 671

² Unni Wikan, *Behind the Veil in Arabia* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982), hlm. 289-325.

merupakan gabungan dua kata, yaitu *jil* (jilbab) dan *boobs* (payudara). Modernisasi dan globalisasi kemudian mempercepat berkembangnya mode *jilboobs* di masyarakat. Sebab globalisasi dan modernisasi adalah fenomena dimana arus barang, orang, dan informasi terutama mengenai fashio yang sedang *hits* dapat dilihat dan ditiru oleh siapa saja. Gerald Adams dan Sheila Marshall (1996, 438) menyebut fenomena diatas sebagai proses pembentukan identitas.³ Berkembangnya fenomena *jilboobs* juga dipengaruhi oleh faktor makro sosial dan mikro individual dalam lingkungan masyarakat.⁴ Menariknya kelompok remaja tersebut dapat eksis dalam komunitas jilbab yang sudah ada, seperti hijabers dan cadar. Identitas mereka dalam satu komunitas dunia jilbab semakin menarik untuk dikaji terutama tentang bagaimana mereka mengklaim posisi (ruang) berupa *fashion* baru dalam kelompok atau komunitas yang telah ada.

Remaja cenderung ingin selalu menjadi pusat perhatian (Stanley Hall, *Santrock 2003*) dan wajar bila dalam berpakaian mereka juga selalu berusaha terlihat modis.⁵ Hal itu sejalan dengan pendapat pakar psikologi pendidikan dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Rose Mini yang menyatakan bahwa fenomena *jilboobs* muncul karena sejumlah perempuan muslim berusaha

³ Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century* (Jepang: Kyoto University, 2012), hlm. 111.

⁴“Makro lingkungan” mengacu pada budaya, ekonomi, demografi penduduk, politik, nilai-nilai kelembagaan, lingkungan fisik, kelas sosial, kasta, dan ras; “mikro individual” meliputi interaksi interpersonal, percakapan, media, dan interaksi rutin. *Ibid.*

⁵ Pangki T Hidayat, “Jilboobs dan Simbol Otokratik”, dalam Kolom Opini Koran *Jawa Pos*, 12 Agustus 2014.

keras agar terlihat mampu mengikuti *fashion* (tren mode).⁶ Saat ini, jilbab dipakai bukan lagi sebagai tanda kesalihan agama, tetapi juga sebuah mode. Ada suatu zaman di masa lampau ketika umat Islam berkeluh-kesah karena ada sikap publik yang kurang bersahabat dengan simbol-simbol keislaman, bahkan pada dekade 60-an dan 70-an, masyarakat memandang negatif terhadap sejumlah simbol Islam, seperti jilbab. Jilbab pada dekade-dekade itu bahkan dipandang sebagai simbol tradisionalisme dan kemunduran umat Islam.⁷

Pola-pola perilaku manusia akan selalu melahirkan simbol-simbol sebagai suatu identitas yang ingin disampaikan.⁸ Berdasarkan penelitian Arlene Elowe Macleod, berjilbab menyangkut perjuangan atas identitas dan peran perempuan dalam masyarakat. Berjilbab juga menegosiasikan makna simbolik bahwasanya wanita bukan makhluk subordinat.⁹ Kalangan remaja ingin terlihat *fashionable* meski sebenarnya publik kurang antusias. Hal tersebut dapat dilihat dari fatwa MUI yang mengharamkan *jilboobs* berdasarkan alasan kesalihan, kesederhanaan, dan juga azab hukuman. Ekspresinya di ruang publik seharusnya dapat dikelola dengan baik karena

⁶ *Ibid.*

⁷ Ulil Abshar-Abdalla, *Islamisasi Ruang Publik*, dalam Kolom Opini *Jaringan Islam Liberal (JIL)*, 6 Februari 2012.

⁸ Ahmad Fedyani Saifudin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76.

⁹ Arlene Elowe Macleod, "Hegemonic Relations and Gender Resistance: The New Veiling as Accommodating Protest in Cairo", dalam *Chicago Journals*, Vol. 17, No. 3 (Spring, 1992), hlm. 551-552.

ruang publik Indonesia adalah ruang publik yang plural dan bagaimanapun kelompok tersebut tidak boleh disepelkan ataupun diistimewakan.

Cara berjilbab berarti sesuatu yang berbeda dari konteks yang berbeda pula, menurut Syirazi dalam bukunya *Semantic Versatility of The Veil* (2001: 222). Jilbab diasumsikan sebagai suatu hal yang terpisah dari konteksnya. Faktor makro sosial dan mikro individual yang menurut Gerald Adams sangat mempengaruhi pembentukan identitas tersebut.¹⁰ Peran media dan arus globalisasi kemudian mempercepat tren *jilboobs* di masyarakat, mulai dari remaja SMA hingga universitas, baik yang dibawah institusi Kementerian Agama maupun umum. Tren *fashion* seperti ini kemudian oleh Karl Marx disebut sebagai *fetisisme komoditi (commodity fetishism)*,¹¹ yaitu fenomena yang melihat sesuatu mempunyai nilai yang inheren pada dirinya, padahal nilai tersebut diciptakan oleh manusia. Sebagai contohnya, rokok dikatakan membangun *pria jantan*, padahal dalam kenyataannya rokok dianggap sebagai salah satu penyebab *kematian*. Begitu juga pada fenomena *jilboobs*. Inheren dalam konsep fetisisme komoditi adalah proses menampilkan makna palsu (*false meaning*) sebuah produk mode, sementara menyembunyikan makna sesungguhnya (*disavowal*). Fetisisme komoditi dalam hal ini dapat dengan mudah menggiring remaja muslimah pada apa yang disebut Marx sebagai

¹⁰ Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese*, hlm. 111.

¹¹ Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna* (Yogyakarta, 2003), hlm. 291-294.

kesadaran palsu (*false consciousness*),¹² yaitu mengenakan *jilboobs* agar terlihat cantik namun tetap mereka anggap *syar'i*.

Stereotype mengenai *jilboobs* tidak bisa lagi diakui keabsahannya, karena pada hakikatnya jilbab sebagai sebuah mode yang berkembang di masyarakat merupakan simbolisasi kerendahan hati dan kesopanan wanita.¹³ Jilbab bukan lagi simbol patriarki, subordinasi, keterbelakangan, dan penindasan terhadap wanita. Adapun mengenai standar etika dan moral estetika dalam berjilbab tidak bisa dijustifikasi berdasarkan sudut pandang patriarki. Hal ini disebabkan karena hanya wanita itu sendiri yang dapat memahami kebutuhan batiniyahnya. Meski demikian, fenomena seperti *jilboobs* akan tetap eksis bahkan mungkin bertransformasi lagi sesuai perkembangan makro sosial dan mikro individual di masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa remaja menjadikan *jilboobs* sebagai *life style*, lalu menjustifikasi apakah *fashion* mereka sendiri sudah sesuai dengan standar *syar'i*, dan identitas apa yang sebenarnya ingin di ungkap dalam fenomena tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkapkan diatas, Penulis memperkirakan bahwasannya *fashion jilboobs* sudah menjadi *life style*

¹² Franz Magnis-Suseno, *filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 227-231.

¹³ Saba Mahmood, *Politics of Piety* (New Jersey: Princeton University Press, 2004), hlm. 23.

dan bentuk identitas kesalehan agama remaja dalam relasi sosialnya. Oleh sebab itu, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya membantu dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

1. Apa makna politis dibalik fenomena *jilboobs*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong remaja mengikuti tren *fashion jilboobs*?
3. Bagaimana *Jilboobsers* menegosiasikan antara *life style* dan syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini pada dasarnya berusaha mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang terjadi di sekeliling kita. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini penulis sajikan dalam beberapa poin sebagai berikut,

1. Guna menjelaskan fenomena sosial (*jilboobs*) yang terjadi sehari-hari dalam interaksi sosial masyarakat
2. Guna menjelaskan keterkaitan antara *fashion syar'i*, politik identitas dan fenomena *jilboobs* dalam masyarakat
3. Guna menjelaskan pola-pola perilaku remaja muslimah indonesia yang larut dalam komoditi mode (jilbab) di masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat yang bisa berguna dalam keterkaitan ilmu antropologi, politik, dan sosiologi. Oleh sebab itu, penulis sajikan dalam beberapa poin sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

- a. Menyumbang khasanah keilmuan baru dalam bidang ilmu sosial dan politik
- b. Memberikan khasanah keilmuan dalam bidang ilmu sosial dan politik menggunakan pendekatan antropogis
- c. Memberikan wawasan sosial budaya masyarakat yang bernafaskan agama yang tengah eksis mengisi ruang publik indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan baru mengenai pola-pola perilaku remaja muslimah, baik dalam mengkreasikan *fashion*, merespon produk hukum (fatwa) MUI, dan juga mengenai kesalahan mereka dalam bermasyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, belum di temukan karya ilmiah dengan judul yang sama. Selain itu, penulis jarang temukan karya-karya ilmiah yang bertemakan *jilboobs* dalam kajian Syiasah. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dunia jilbab hanya menjelaskan tentang makna jilbab sebagai suatu kewajiban agama dan budaya. tanpa mengkaitkannya dengan ilmu politik. Hanya sedikit karya yang membahas tentang jilbab dan politik namun dengan kasus dan objek yang berbeda.

Buku Awy A. Qolawun yang berjudul “Dari *Jilboobs* Hingga Nikah Beda Agama” terbitan Mizania dan buku Li Partic, “Jilbab Bukan *Jilboobs*: 101 Cara Berjilbab Sempurna”, terbitan gramedia. Buku ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melihat jilbab sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa ditwar lagi, baik bentuk dan kewajiban mengenakannya. Menjelaskan hijab syar’i secara sempit. Keduanya memandang hijab syar’i sebatas sebagai pakaian, tanpa memandang bagaimana motif dibalik muslimah tersebut berhijab.

Artikel Arlene Elowe Macleod yang berjudul “*Hegemonic Relations and Gender Resistance: The New Veiling as Accomodation Protest in Cairo*”, dalam *Chicago Journals*, Vol. 17. No. 3 (*Spring*, 1992). Artikel ini menggunakan pendekatan antropologis. Menjelaskan mengenai permasalahan sosial-politik jilbab di Kairo. Mendeskripsikan bahwasanya berjilbab menyangkut perjuangan atas identitas dan peran perempuan dalam masyarakat. Serta menegosiasi makna simbolik bahwasannya wanita bukan makhluk subordinat.¹⁴

Artikel Saba Mahmood yang berjudul “*Politics Piety*” dalam *Princeton University Press*, 2004. Artikel ini menggunakan pendekatan antropologis. Menjelaskan fenomena jilbab di Timur Tengah dan Amerika. Mendeskripsikan bahwasannya pada hakikatnya jilbab sebagai sebuah mode yang berkembang di masyarakat merupakan simbolisasi kerendahan hati dan

¹⁴ Arlene Elowe Macleod, *Hegemonic.*, hlm. 551-552.

kesopanan wanita. Jilbab bukan lagi simbol patriarki, subordinasi, keterbelakangan, dan penindasan terhadap wanita.¹⁵

Artikel Kurniawati Hastuti Dewi yang berjudul “*Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century*” dalam jurnal *Southeast Asian Studies*, Vol. 1, No. 1, 2012, Kyoto University. Artikel ini menggunakan pendekatan historis. Menjelaskan perkembangan jilbab pada wanita jawa dalam dua puluh dekade terakhir. Menggambarkan mengenai faktor budaya yang berkembang dan mempengaruhi pembentukan identitas wanita jawa pasca islamisasi. Berusaha mengaitkannya pada fenomena politik yang berkembang di balik jilbab sebagai alat pendulang suara.¹⁶

Skripsi Qoidud Duwal yang berjudul “*Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*” , Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, dimana kerangka pemikiran seorang tokoh digunakan dalam menjustifikasi fenomena jilbab Indonesia. Selain itu ada beberapa skripsi yang mengulas tentang jilbab akan tetapi dengan pendekatan yang sama yaitu normatif (perspektif hukum islam).¹⁷

¹⁵ Saba Mahmood, *Politics.*, hlm. 23.

¹⁶ Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese.*, hlm. 111.

¹⁷ Qoidud Duwal, *Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*, Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori politik identitas sebagai pisau analisis fenomena *jilboobs* yang berkembang di masyarakat. Teori ini penulis anggap mampu mengupas lebih dalam fenomena tersebut, karena hadirnya *life style jilboobs* berawal dari faktor makro sosial dan mikro individual dalam masyarakat.¹⁸ Sehingga memunculkan perbedaan pola, logika, dan perilaku dalam menyikapi arus besar *fashion* jilbab yang sudah ada.

Teori politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994.¹⁹ Menurut Abdilah Ubed, Politik identitas dibangun atas basis etnis, diawali oleh kesadaran untuk mengidentikan diri ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran inilah yang memunculkan solidaritas pengelompokan tersebut, sehingga eksklusivitas menjadi tidak terhindarkan.²⁰ Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (*political of identity*).

¹⁸ Makro lingkungan” mengacu pada budaya, ekonomi, demografi penduduk, politik, nilai-nilai kelembagaan, lingkungan fisik, kelas sosial, kasta, dan ras; “mikro individual” meliputi interaksi interpersonal, percakapan, media, dan interaksi rutin. Menurut Gerald Adams dan Sheila Marshall, dalam artikel Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese.*, hlm. 111.

¹⁹ Abdilah Ubed, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Indonesia: Malang, 2002), hlm.16-17.

²⁰ *Ibid.*,

Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Cressida Heyes memberi definisi politik identitas yang sangat jelas. Menurutnya politik identitas adalah aktivitas dalam arti luas. Secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum yang terpinggirkan’ dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat.²¹

Merujuk Eriksen, timbulnya perasaan untuk berkumpul pada identitas yang sama seperti etnisitas berdasarkan pada kecenderungan di dalam setiap kumpulan manusia. Guna membedakan antara orang dalam dan orang luar, serta menarik garis batas sosial, dan kecenderungan untuk membangun stereotip-stereotip tentang “kumpulan lain”. Kecenderungan membangun stereotip-stereotip tentang kumpulan lain ini juga sebenarnya merupakan cara untuk mendukung dan membenarkan garis batas sosial ini. Eriksen menekankan bahwa etnisitas muncul ketika “perbedaan-perbedaan kultural yang dipersepsikan akan berakibat pada perbedaan sosial” (*ethnicity occurs*

²¹ Cressida Heyes. *Identity politics*. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy <<http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/>>.

when perceived cultural differences make a social difference). Etnisitas muncul karena adanya interaksi dari kumpulan-kumpulan yang merasa “berbeda”, ketika perbedaan “kita” dan “mereka” menjadi penting.²²

Sedangkan menurut Buya Syafi’i Ma’arif, politik identitas secara substantif menyangkut masalah kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.²³ Seperti halnya kelompok *jilboobs*, mereka tentunya tidak menginginkan adanya diskriminasi dan juga pandangan stereotip mengenai model busana mereka. Disini isu mengenai keadilan, egalitarian, dan juga persepsi publik menjadi penting untuk didiskusikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial.²⁴ Tidak terpaku pada hasil-hasil survei ataupun data statistik yang ada. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

²²Thomas Hylland Eriksen “*Ethnic Identity, National Identity and Intergroup Conflict: The Significance of Personal Experiences*” (In R. Ashmore et al., eds., *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, 2001) Oxford: Oxford University Press, hlm. 43-63.

²³ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 5.

²⁴ Hamid patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Model penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan atau observasi penulis di lapangan. bukan hanya itu, data juga mungkin dikumpulkan dari beberapa tulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk buku, jurnal, opini dan lain sebagainya. Tentunya yang sekiranya patut dan relevan dengan problematika yang disajikan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penulis mendeskripsikan permasalahan atau variabel²⁵ antara fenomena *jilboobs* dan politik patriarki ala Indonesia. Kemudian penulis analisa bagaimana fenomena *jilboobs* berubah menjadi *life style* dikalangan remaja ditengah strootip mengenai fenomena ini. Sehingga terungkap keterkaitan antara fenomena tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan antropologi. Dimana fenomena *jilboobs* yang berkembang mejadi *fashion* dan *life style* dipandang sebagai suatu kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang memiliki

²⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet.ke-4 (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012), hlm. 104.

kebenarannya sendiri. Bukan untuk menghakimi fenomena tersebut, melainkan untuk menjelaskan gejala-gejala *life style jilboobs* yang memiliki hubungan dengan fenomena munculnya (fatwa MUI) dalam interaksi masyarakat.²⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Data yang dihadirkan dari pengamatan langsung dilapangan dan atau juga menggunakan teknik wawancara. Selain itu, juga berasal dari sumber sekunder semisal buku atau karya ilmiah yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

Penulis membatasi lapangan yang menjadi sumber data penelitian ini. Sumber primer penulis dapatkan dari penelitian langsung dikawasan UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta dan sekitarnya yang penulis anggap sebagai pusat estetika, budaya, dan mode yang berbau Islami. Selain itu mengingat Yogyakarta selain sebagai kota wisata budaya, juga sebagai kota pelajar. Sehingga tak jarang banyak remaja yang statusnya sebagai pelajar atau mahasiswi banyak terjangkit virus *jilboobs*.

²⁶ Koentjara Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 53.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, baik primer atau skunder, maka data tersebut dianalisis dengan model analisis induktif. Analisis induktif berpijak pada data sebagai langkah awal yang kemudian diteliti dengan tujuan mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang lebih bersifat umum.²⁷ Kemudian data dianalisis menggunakan teori politik identitas, yaitu bagaimana suatu fenomena sosial dapat membentuk identitas baru. Kemudian identitas tersebut dalam perjalanannya kurang mendapatkan respon positif. Sehingga hal ini memberikan ruang justifikasi dan standarisasi yang sifatnya stereotip dan patriarki. Sebab penilaiannya menggunakan sudut pandang yang penulis anggap konservatif. Sehingga kita dapat melihat dan menilai apa sebenarnya politik identitas yang ada dibalik fenomena ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan penelitian ini dalam beberapa bab pembahasan, terkait dengan permasalahan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Bab I, dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II, dibahas mengenai gambaran umum

²⁷ H. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 27.

konstelasi jilbab di Indonesia. Bab III, dibahas mengenai permasalahan umum fenomena *jilboobs* bagi Mahasiswi, dan kaitannya dengan fatwa MUI, serta data-data yang didapatkan langsung dari lapangan. Selanjutnya Bab IV, dibahas mengenai analisis, bagaimana fenomena *jilboobs* bertransformasi menjadi *life style* dan akhirnya memunculkan politik identitas tertentu yang melekat pada remaja muslimah, serta menghubungkannya dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang haramnya *jilboobs* dalam kacamata teori (analisis). Terakhir bab V, berisikan tentang kesimpulan terhadap hasil analisis, serta memuat saran-saran yang kiranya relevan dan diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan beberapa saran mengenai probelematika yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Istilah *jilboobs* merupakan gabungan dua kata, yaitu *Jil* (jilbab) dan *boobs* (payudara). Istilah tersebut digunakan merujuk kepada wanita muslim yang mengenakan jilbab tapi pada saat yang sama mengenakan pakaian yang menonjolkan lekuk tubuh mereka, khususnya payudara. Fenomena *jilboobs* ramai dibicarakan setelah MUI memberikan fatwa haram terhadap model pakaian mereka. Hal ini sempat menjadi *trending* topik di beberapa stasiun televisi di Indonesia, banyak pro-kontra setelah MUI memfatwa haram *jilboobs*. MUI mendasarkan keharaman tersebut berdasarkan fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Tren *jilboobs* dinilai keliru dan rentan terhadap pelecehan seksual, wanita muslim dinilai berusaha memvisualisasikan bentuk tubuh mereka yang akhirnya akan mengundang nafsu laki-laki untuk berbuat tidak sopan.

Hingga saat ini institusi agama dan mayoritas masyarakat terlalu memandang sederhana, reduksionis, dan hitam-putih urusan seksualitas

(khususnya tentang Jilbab dan pemahamannya yang berkembang di masyarakat). Faktor makro sosial dan mikro individual tidak diperhitungkan dalam menjustifikasi fenomena *jilboobs* yang dianggap sebagai model jilbab yang keliru. Sedangkan pemahaman *Jilboobers* akan jilbab juga relatif sama dengan wanita muslim pada umumnya, yaitu jilbab sebagai penutup aurat, identitas diri, *self defence*, dan *fashion*. Pemahaman tentang perilaku ini hanya bisa diraih dari sudut pandang pengalaman-pengalaman subyektif (antropologis), ide-ide, dan tujuan-tujuan yang diinginkan individu ringkasnya dari sudut pandang 'makna' (*sinn*) perilaku religius (*Jilboobers*) itu sendiri.

Tren *jilboobs* berkembang seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan modernisasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari arus pergerakan orang, barang, pemikiran, gagasan seni, budaya, bahasa, fashion dan lainnya berlangsung begitu dinamis tanpa bisa dihalangi dan dibendung oleh batas-batas politik negara-bangsa. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan memiliki populasi terbesar ke-4 dunia. Salah satu ciri negara yang tengah berkembang adalah banyaknya investor yang menginvestasikan dananya guna membangun industri dalam skala nasional, guna menumbuhkan laju ekonomi negara tersebut. Masyarakat pada tahap ini mengalami pergeseran sumber daya. Ernest Gellner menyebutnya masyarakat industri. Masyarakat industri hidup dalam suasana ekspansi kapitalisme, mereka dituntut memiliki daya saing dalam bekerja. Hal tersebut hanya dapat tercapai jika kebutuhan pendidikan terpenuhi oleh negara. Negara dituntut untuk melakukan standarisasi pendidikan guna

mencetak manusia-manusia yang bersumberdaya tinggi dan universal (homogen). Dengan kata lain, masyarakat industri modern tergantung pada inovasi, mobilitas pekerjaan, aturan penulisan universal, dan sistem pendidikan yang menanamkan standarisasi kebudayaan tinggi.

Ernest Gellner juga menyebut masyarakat pada fenomena di atas sebagai masyarakat rasional. Gellner menyadari pengaruh modernisasi pada agama secara umum, dalam istilah homogenisasi kebudayaan melalui sistem pendidikan yang dikontrol oleh negara. Menurutnya kemunduran keyakinan terhadap agama dan pelaksanaannya adalah konsekuensi yang sudah sewajarnya dari pertumbuhan masyarakat industri-pengetahuan (*scientific-industrial*), yang dibawa oleh fenomena keseragaman pendidikan massal. Wibawa keyakinan agama (dalam hal ini mengenai jilbab) memudar begitu wibawa ilmu pengetahuan semakin bersinar.

Jilbab dalam konstelasi masyarakat industri bukan lagi sekedar simbolisasi kewajiban agama, melainkan sebagai suatu *fashion* dan *life style*. Jilbab dapat menjelaskan posisi dan status seseorang dalam kehidupannya bermasyarakat. Tren mode *jilboobs* hadir di persimpangan antara *fashion*, *life style*, dan syari'ah. Ia merupakan bentuk negosiasi dari ketiganya. Remaja muslimah ingin terlihat *fashionable*, atraktif, sekaligus saleh dalam relasinya di masyarakat, walau dalam kenyataannya model jilbab mereka mendapat kritik keras dari ulama MUI. *Jilboobs* memiliki makna politis yang sangat khas, yaitu bentuk resistensi pemahaman jilbab yang konservatif dan kental akan nuansa

politik pengistimewaan *gender* tertentu (patriarkis). Jilbab bukan lagi perpanjangan tangan kaum laki-laki guna memenjara kebebasan ekspresi mereka. Mereka menganggap Islam yang humanis ialah yang mampu menerima modernisasi sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi.

Pandangan mereka mengenai jilbab syar'i adalah model jilbab tertutup seperti jubah yang hanya menampilkan telapak tangan dan wajah. Meski demikian, model pakaian *jilboobs* yang mereka kenakan tidak ingin dicap tidak syar'i. Mereka beranggapan berjilbab memang perintah agama yang sudah jelas, tapi urusan mengenai bentuk atau model jilbab yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai konteks kekinian. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Karim Soroush yang memisahkan antara agama (*religion*) dan pengetahuan agama (*religious knowledge*). Kalau agama adalah kebenarannya tidak bisa diganggu gugat, sedangkan pengetahuan akan agama adalah bentuk penafsiran seseorang terhadap agama tersebut, yang kebenarannya sangat relatif dan bisa diperdebatkan. *Jilboobers* juga meyakini tidak ada korelasi yang pasti antara bentuk jilbab yang dikenakan dengan perilaku, sopan santun, dan moralitas yang baik.

Jilboobers yang menjadi sorotan fatwa haram MUI adalah mereka yang berusia 15 sampai 30 tahun, karena pada usia tersebut mereka secara fisik masih terlihat menarik dan cantik. Usia ini merupakan usia produktif, dimana mobilitas wanita muslim menjadi penentu masa depan mereka. kebutuhan akan pengetahuan dan pengalaman bergantung pada masa muda yang dimanfaatkan

seefektif dan semaksimal mungkin. *Jilboobers* meyakini jika model jilbab yang mereka kenakan memiliki daya jelajah yang lebih dibanding dengan mereka yang berjilbab tertutup atau berjubah. Sehingga mereka merasa fashion *jilboobs* merupakan jawaban yang pas terhadap tantangan modernisasi dan juga masa tua. Hal tersebut yang kemudian secara tidak langsung menjadi politik identitas *Jilboobers*, ada nilai dan simbol agama yang diperthankan sekaligus menerima tantangan modernisasi. Walau secara psikologis sebagian mereka merasa terdiskriminasi atas *stereotype-stereotype* pemahaman konvensional mengenai jilbab.

B. Saran

Permasalahan mengenai jilbab seharusnya bukan lagi permasalahan mengenai dominasi *gender* tertentu. Negara tidak dibangun berdasarkan superioritas dan hegemoni kaum laki-laki terhadap perempuan. Persoalan *jilboobs* seharusnya dilihat dari sisi egalitarian-demokratis bukan dogmatis-konservatif, artinya permasalahan tersebut lahir dari pertemuan antara paham demokrasi dan agama yang saling berkaitan. *Stereotype* mengenai *jilboobs* tidak akan pernah berhasil mengubah watak kaum muda yang selalu ingin terlihat atraktif. Hal yang kemudian diperlukan adalah bagaimana kita mendesain ulang model pakaian muslimah agar terlihat syar'i sekaligus *fashionable*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV.Darus Sunnah, 2002.

B. Fikih/Hukum Islam/Islam

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Muhyidin, Muhammad, *Membelah Lautan Jilbab*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008.

Munawir, Warson, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Partic, Li, *Jilbab Bukan Jilboobs: 101 Cara Berjilbab Sempurna*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014.

Yafie, K.H Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

C. Hukum, Sosial, dan Politik

Al-Ghifari, Abu, *Wanita Bukan Makhluq Penggoda*, Bandung: Mujahid Press, 2005.

Barlas, Asma, *Believing Woman in Islam*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Bungin, H. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Eviandaru, Monika, *Perempuan Post-Kolonial dan Identitas Komoditi Global*, Yogyakarta: Obor, 2001.

Foucault, Michel, *History of Sexuality*, alih bahasa Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan FIB Universitas Indonesia dan Forum Jakarta-Paris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Gellner, Ernest, *Nations and Nationalism*, Oxford: Blacwell, 1983.

Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory*, (terj.) Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2013.

- Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: INSISTPress, 2007.
- Koentjara Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Aksara Baru, 1980.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern dalam Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontempore: Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Piliang, Yasraf Amir, *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Akasara Baru, 2003.
- Prasetyo, Hendro, *Islam & civil Society: Pandangan Mulim Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2002.
- Qolwun, A. Awy, *Dari Jilboobs Hingga Nikah Beda Agama*, Jakarta: Mizania, 2015.
- Saifudin, Ahmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet.ke-4, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012.
- Suseno, Franz Magnis, *filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Syahrial Syarbaini, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
- Ubed, Abdilah, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Vaezi, Ahmed, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006.
- Weber, Max, *The Sociology of Religion*, alih bahasa Yudi santoso (yogyakarta: IRCiSoD, 2012).
- Wilson, Bryan, *Religion in Sociological Perspective*, oxford: Oxford University Press, 1982.

D. Jurnal

- Antoun, Richard, On the Modesty of Women in Arab Muslim Villages, dalam *Jurnal American Anthropologist* 70, no. 4, 1968.
- Brenner, Suzanne Brenner, Recontrucsing Self and Society: Javanese Muslim Women and The Veil, dalam *Journal of The American Ethnological Society*, University of Calivornia, 1996.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, *Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century*, Jepang: Kyoto University Press, 2012.
- Eriksen, Thomas Hylland, *Ethnic Identity, National Identity and Intergroup Conflict: The Significance of Personal Experiences*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Hasan, Noorhaidi, Violent Activism, Islamist Ideology, and the Conquest of Public Space among Youth in Indonesia, dalam jurnal *al-Jami'ah*.
- Hasan, Noorhaidi, Piety, Poltics, and Post-Islamism: *Dhikr Akbar* in Indonesia, dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, vol. 50, No. 2, 2012.
- Macleod, Arlene Elowe, Hegemonic Relations and Gender Resistance: The New Veiling as Accommodating Protest in Cairo, dalam *Chicago Journals*, Vol. 17, No. 3, Spring, 1992.
- Mahmood, Saba, *Poltics of Piety*, New Jersey: Princeton University Press, 2004.
- Sriharini, Jilbab dan Kiprah Perempuan dalam Sektor Publik, dalam Jurnal *PMI*, Vol. VI. No. 1, September, 2008.
- Wikan, Unni, *Behind the Veil in Arabia*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.

E. Skripsi/Thesis/Research

- Duwal, Qoidud, *Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*, Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

F. Makalah

- Salim, Darby Jusbar, *Busana Muslim dan permasalahannya*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I, 1984.

G. Perundang-undangan

Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

H. Koran dan Majalah

Abdalla, Ulil Abshar, Islamisasi Ruang Publk, dalam Kolom Opini *Jaringan Islam Liberal (JIL)*, 6 Februari 2012.

Abshar, Ulil, Syari'at Islam di Jalur Lambat, dalam Majalah *Tempo*, No. 11/XXXV/ edisi 8-14, 2006.

Hidayat, Pangki T, Jilboobs dan Simbol Otokratik, dalam Kolom Opini Koran *Jawa Pos*, 12 Agustus 2014.

Sururin, Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur'an, dalam Majalah *AULA*, No. 04/Th.XXII, April 2000

Suryakusuma, Julia, Jilboobs: A Storm in a D-cup, dalam kolom opini koran *Jakarta Post*, 20 agustus 2014

Wahyono, Joko, HAM dan Daulat Jilbab Polwan, dalam Kolom Opini Koran *Suara Karya* Yogyakarta, 2013.

I. Wawancara

Wawancara bersama Fhaviola Model dan Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, pada 26 maret 2015.

Wawancara bersama Diana Kartika Sari Model dan Mahasiswi Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, pada 27 maret 2015.

Wawancara bersama Khoirani Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, pada 27 maret 2015.

Wawancara bersama Maylani Putri Gunavy mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Lady Famulia Fakultas mahasiswi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Indah Arifatul Ulfiyah mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Exfarani Amaliyah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Novi Hidayanti mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Risqi Andhani mahasiswi Fakultas Pertanian UNSOED, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Fitri Mei Saroh mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Umi Solikhah mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Fifty Aryaningsih mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada 29 maret 2015.

J. Website

Heyes, Cressida, *Identity politics*. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy <<http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/>>.

Idham Putra, *Teori Identitas Sosial*, 2008. Idhamputra.wordpress.com.

Dwi Andi Susanto, “Banyak Pro-Kontra Setelah MUI Fatwa Haram Jilboobs”, dalam *Merdeka.com*. <http://www.merdeka.com/teknologi/banyak-pro-dan-kontra-setelah-mui-fatwa-haram-jilboobs.html>. diakses pada, 26 maret 2015.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB II			
1.	24	18	Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lampiran II

Bukti Wawancara dan Foto



Wawancara dengan Fhaviola, Mahasiswi UNY sekaligus model di Yogyakarta pada 30 maret 2015.



Wawancara dengan Lady dan Meylani, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 4 april 2015.



Kode etik pakaiana mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DAN FATWA MUI

1. Apa makna jilbab bagi anda?
2. Apa pandangan anda terhadap hijab syar'i?
3. Apa pandangan anda terhadap hijab modis?
4. Apa makna aurat bagi anda?
5. Apakah anda mengetahui adanya standarisasi penggunaan hijab syar'i (fatwa MUI)?
6. Apa respon anda terhadap fatwa MUI yang mengharamkan model jilbab yang masih menampilkan lekuk tubuh (*jilboobs*)?
7. Bagaimana anda mensiasati model berpakaian anda agar terkesan terlihat syar'i?
8. Seberapa jauh pengaruh modernisasi dalam perkembangan dunia jilbab di lingkungan anda?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Syarief Husyein
Tempat/Tgl. Lahir : Indragiri Hilir, 19 Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Bayas Jaya RT. 004 RW. 004 Desa Bayas Jaya,
Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau.
Ayah : S. Abdul Hamid
Ibu : Rodiyah
Saudara : Ika Fitriana
Alwi Sabah
Ahmad Syakur
Cp : 085729323644
E-mail : syarifhusen@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Al-Muhajirin, Bayas Jaya, Indragiri Hilir, Lulus 2004
2. MTS N Kebumen I, Kebumen, Lulus 2007
3. MA Khairul Ummah, Air Molek, Indragiri Hulu, Lulus 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-Sekarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi 1998, Islamisasi membawa perubahan sosial di Indonesia. Islamisasi di Indonesia ditandai dengan jilbab sebagai alat perjuangan dalam rangka menumbangkan rezim Soeharto dan perlawanan terhadap *westernisasi*. Bagi orang barat, jilbab merupakan bentuk manipulasi perilaku wanita, sedangkan di Timur Tengah jilbab dinilai sebagai alat simbolis *stereotype* dan digunakan hanya ketika bertemu orang asing atau sebagai pekerja publik.¹ Jilbab dapat berfungsi sebagai alat komunikasi non verbal antara yang memakai dan orang yang melihat, yaitu mengkomunikasikan pesan seperti status perkawinan, pendidikan, dan tempat asal.² Fenomena jilbab di setiap negara memiliki ciri khas berbeda dipengaruhi oleh sistem budaya yang berkembang sejak lama.

Dewasa ini, fenomena yang berkembang mengenai dunia jilbab Indonesia adalah munculnya kelompok remaja yang menggunakan jilbab, namun juga mengenakan pakaian ketat. Hal tersebut menjadi gaya hidup (*life style*) dan *fashion* guna tampil cantik namun masih dalam koridor yang mereka anggap *syar'i*. Fenomena ini disebut *jilboobs*. Istilah *jilboobs*

¹ Richard Antoun, "On the Modesty of Women in Arab Muslim Villages", dalam Jurnal *American Anthropologist* 70, no. 4, 1968, hlm. 671

² Unni Wikan, *Behind the Veil in Arabia* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982), hlm. 289-325.

merupakan gabungan dua kata, yaitu *jil* (jilbab) dan *boobs* (payudara). Modernisasi dan globalisasi kemudian mempercepat berkembangnya mode *jilboobs* di masyarakat. Sebab globalisasi dan modernisasi adalah fenomena dimana arus barang, orang, dan informasi terutama mengenai fashio yang sedang *hits* dapat dilihat dan ditiru oleh siapa saja. Gerald Adams dan Sheila Marshall (1996, 438) menyebut fenomena diatas sebagai proses pembentukan identitas.³ Berkembangnya fenomena *jilboobs* juga dipengaruhi oleh faktor makro sosial dan mikro individual dalam lingkungan masyarakat.⁴ Menariknya kelompok remaja tersebut dapat eksis dalam komunitas jilbab yang sudah ada, seperti hijabers dan cadar. Identitas mereka dalam satu komunitas dunia jilbab semakin menarik untuk dikaji terutama tentang bagaimana mereka mengklaim posisi (ruang) berupa *fashion* baru dalam kelompok atau komunitas yang telah ada.

Remaja cenderung ingin selalu menjadi pusat perhatian (Stanley Hall, *Santrock 2003*) dan wajar bila dalam berpakaian mereka juga selalu berusaha terlihat modis.⁵ Hal itu sejalan dengan pendapat pakar psikologi pendidikan dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Rose Mini yang menyatakan bahwa fenomena *jilboobs* muncul karena sejumlah perempuan muslim berusaha

³ Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century* (Jepang: Kyoto University, 2012), hlm. 111.

⁴“Makro lingkungan” mengacu pada budaya, ekonomi, demografi penduduk, politik, nilai-nilai kelembagaan, lingkungan fisik, kelas sosial, kasta, dan ras; “mikro individual” meliputi interaksi interpersonal, percakapan, media, dan interaksi rutin. *Ibid.*

⁵ Pangki T Hidayat, “Jilboobs dan Simbol Otokratik”, dalam Kolom Opini Koran *Jawa Pos*, 12 Agustus 2014.

keras agar terlihat mampu mengikuti *fashion* (tren mode).⁶ Saat ini, jilbab dipakai bukan lagi sebagai tanda kesalihan agama, tetapi juga sebuah mode. Ada suatu zaman di masa lampau ketika umat Islam berkeluh-kesah karena ada sikap publik yang kurang bersahabat dengan simbol-simbol keislaman, bahkan pada dekade 60-an dan 70-an, masyarakat memandang negatif terhadap sejumlah simbol Islam, seperti jilbab. Jilbab pada dekade-dekade itu bahkan dipandang sebagai simbol tradisionalisme dan kemunduran umat Islam.⁷

Pola-pola perilaku manusia akan selalu melahirkan simbol-simbol sebagai suatu identitas yang ingin disampaikan.⁸ Berdasarkan penelitian Arlene Elowe Macleod, berjilbab menyangkut perjuangan atas identitas dan peran perempuan dalam masyarakat. Berjilbab juga menegosiasikan makna simbolik bahwasanya wanita bukan makhluk subordinat.⁹ Kalangan remaja ingin terlihat *fashionable* meski sebenarnya publik kurang antusias. Hal tersebut dapat dilihat dari fatwa MUI yang mengharamkan *jilboobs* berdasarkan alasan kesalihan, kesederhanaan, dan juga azab hukuman. Ekspresinya di ruang publik seharusnya dapat dikelola dengan baik karena

⁶ *Ibid.*

⁷ Ulil Abshar-Abdalla, *Islamisasi Ruang Publik*, dalam Kolom Opini *Jaringan Islam Liberal (JIL)*, 6 Februari 2012.

⁸ Ahmad Fedyani Saifudin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76.

⁹ Arlene Elowe Macleod, "Hegemonic Relations and Gender Resistance: The New Veiling as Accommodating Protest in Cairo", dalam *Chicago Journals*, Vol. 17, No. 3 (Spring, 1992), hlm. 551-552.

ruang publik Indonesia adalah ruang publik yang plural dan bagaimanapun kelompok tersebut tidak boleh disepelkan ataupun diistimewakan.

Cara berjilbab berarti sesuatu yang berbeda dari konteks yang berbeda pula, menurut Syirazi dalam bukunya *Semantic Versatility of The Veil* (2001: 222). Jilbab diasumsikan sebagai suatu hal yang terpisah dari konteksnya. Faktor makro sosial dan mikro individual yang menurut Gerald Adams sangat mempengaruhi pembentukan identitas tersebut.¹⁰ Peran media dan arus globalisasi kemudian mempercepat tren *jilboobs* di masyarakat, mulai dari remaja SMA hingga universitas, baik yang dibawah institusi Kementerian Agama maupun umum. Tren *fashion* seperti ini kemudian oleh Karl Marx disebut sebagai *fetisisme komoditi (commodity fetishism)*,¹¹ yaitu fenomena yang melihat sesuatu mempunyai nilai yang inheren pada dirinya, padahal nilai tersebut diciptakan oleh manusia. Sebagai contohnya, rokok dikatakan membangun *pria jantan*, padahal dalam kenyataannya rokok dianggap sebagai salah satu penyebab *kematian*. Begitu juga pada fenomena *jilboobs*. Inheren dalam konsep fetisisme komoditi adalah proses menampilkan makna palsu (*false meaning*) sebuah produk mode, sementara menyembunyikan makna sesungguhnya (*disavowal*). Fetisisme komoditi dalam hal ini dapat dengan mudah menggiring remaja muslimah pada apa yang disebut Marx sebagai

¹⁰ Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese*, hlm. 111.

¹¹ Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna* (Yogyakarta, 2003), hlm. 291-294.

kesadaran palsu (*false consciousness*),¹² yaitu mengenakan *jilboobs* agar terlihat cantik namun tetap mereka anggap *syar'i*.

Stereotype mengenai *jilboobs* tidak bisa lagi diakui keabsahannya, karena pada hakikatnya jilbab sebagai sebuah mode yang berkembang di masyarakat merupakan simbolisasi kerendahan hati dan kesopanan wanita.¹³ Jilbab bukan lagi simbol patriarki, subordinasi, keterbelakangan, dan penindasan terhadap wanita. Adapun mengenai standar etika dan moral estetika dalam berjilbab tidak bisa dijustifikasi berdasarkan sudut pandang patriarki. Hal ini disebabkan karena hanya wanita itu sendiri yang dapat memahami kebutuhan batiniyahnya. Meski demikian, fenomena seperti *jilboobs* akan tetap eksis bahkan mungkin bertransformasi lagi sesuai perkembangan makro sosial dan mikro individual di masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa remaja menjadikan *jilboobs* sebagai *life style*, lalu menjustifikasi apakah *fashion* mereka sendiri sudah sesuai dengan standar *syar'i*, dan identitas apa yang sebenarnya ingin di ungkap dalam fenomena tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkapkan diatas, Penulis memperkirakan bahwasannya *fashion jilboobs* sudah menjadi *life style*

¹² Franz Magnis-Suseno, *filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 227-231.

¹³ Saba Mahmood, *Politics of Piety* (New Jersey: Princeton University Press, 2004), hlm. 23.

dan bentuk identitas kesalehan agama remaja dalam relasi sosialnya. Oleh sebab itu, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya membantu dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

1. Apa makna politis dibalik fenomena *jilboobs*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong remaja mengikuti tren *fashion jilboobs*?
3. Bagaimana *Jilboobsers* menegosiasikan antara *life style* dan syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini pada dasarnya berusaha mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang terjadi di sekeliling kita. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini penulis sajikan dalam beberapa poin sebagai berikut,

1. Guna menjelaskan fenomena sosial (*jilboobs*) yang terjadi sehari-hari dalam interaksi sosial masyarakat
2. Guna menjelaskan keterkaitan antara *fashion syar'i*, politik identitas dan fenomena *jilboobs* dalam masyarakat
3. Guna menjelaskan pola-pola perilaku remaja muslimah indonesia yang larut dalam komoditi mode (jilbab) di masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat yang bisa berguna dalam keterkaitan ilmu antropologi, politik, dan sosiologi. Oleh sebab itu, penulis sajikan dalam beberapa poin sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

- a. Menyumbang khasanah keilmuan baru dalam bidang ilmu sosial dan politik
- b. Memberikan khasanah keilmuan dalam bidang ilmu sosial dan politik menggunakan pendekatan antropogis
- c. Memberikan wawasan sosial budaya masyarakat yang bernafaskan agama yang tengah eksis mengisi ruang publik indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan baru mengenai pola-pola perilaku remaja muslimah, baik dalam mengkreasikan *fashion*, merespon produk hukum (fatwa) MUI, dan juga mengenai kesalahan mereka dalam bermasyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, belum di temukan karya ilmiah dengan judul yang sama. Selain itu, penulis jarang temukan karya-karya ilmiah yang bertemakan *jilboobs* dalam kajian Syiasah. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dunia jilbab hanya menjelaskan tentang makna jilbab sebagai suatu kewajiban agama dan budaya. tanpa mengkaitkannya dengan ilmu politik. Hanya sedikit karya yang membahas tentang jilbab dan politik namun dengan kasus dan objek yang berbeda.

Buku Awy A. Qolawun yang berjudul “Dari *Jilboobs* Hingga Nikah Beda Agama” terbitan Mizania dan buku Li Partic, “Jilbab Bukan *Jilboobs*: 101 Cara Berjilbab Sempurna”, terbitan gramedia. Buku ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melihat jilbab sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa ditwar lagi, baik bentuk dan kewajiban mengenakannya. Menjelaskan hijab syar’i secara sempit. Keduanya memandang hijab syar’i sebatas sebagai pakaian, tanpa memandang bagaimana motif dibalik muslimah tersebut berhijab.

Artikel Arlene Elowe Macleod yang berjudul “*Hegemonic Relations and Gender Resistance: The New Veiling as Accomodation Protest in Cairo*”, dalam *Chicago Journals*, Vol. 17. No. 3 (*Spring*, 1992). Artikel ini menggunakan pendekatan antropologis. Menjelaskan mengenai permasalahan sosial-politik jilbab di Kairo. Mendeskripsikan bahwasanya berjilbab menyangkut perjuangan atas identitas dan peran perempuan dalam masyarakat. Serta menegosiasi makna simbolik bahwasannya wanita bukan makhluk subordinat.¹⁴

Artikel Saba Mahmood yang berjudul “*Politics Piety*” dalam *Princeton University Press*, 2004. Artikel ini menggunakan pendekatan antropologis. Menjelaskan fenomena jilbab di Timur Tengah dan Amerika. Mendeskripsikan bahwasannya pada hakikatnya jilbab sebagai sebuah mode yang berkembang di masyarakat merupakan simbolisasi kerendahan hati dan

¹⁴ Arlene Elowe Macleod, *Hegemonic.*, hlm. 551-552.

kesopanan wanita. Jilbab bukan lagi simbol patriarki, subordinasi, keterbelakangan, dan penindasan terhadap wanita.¹⁵

Artikel Kurniawati Hastuti Dewi yang berjudul “*Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century*” dalam jurnal *Southeast Asian Studies*, Vol. 1, No. 1, 2012, Kyoto University. Artikel ini menggunakan pendekatan historis. Menjelaskan perkembangan jilbab pada wanita Jawa dalam dua puluh dekade terakhir. Menggambarkan mengenai faktor budaya yang berkembang dan mempengaruhi pembentukan identitas wanita Jawa pasca islamisasi. Berusaha mengaitkannya pada fenomena politik yang berkembang di balik jilbab sebagai alat pendulang suara.¹⁶

Skripsi Qoidud Duwal yang berjudul “*Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*” , Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, dimana kerangka pemikiran seorang tokoh digunakan dalam menjustifikasi fenomena jilbab Indonesia. Selain itu ada beberapa skripsi yang mengulas tentang jilbab akan tetapi dengan pendekatan yang sama yaitu normatif (perspektif hukum Islam).¹⁷

¹⁵ Saba Mahmood, *Politics.*, hlm. 23.

¹⁶ Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese.*, hlm. 111.

¹⁷ Qoidud Duwal, *Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*, Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori politik identitas sebagai pisau analisis fenomena *jilboobs* yang berkembang di masyarakat. Teori ini penulis anggap mampu mengupas lebih dalam fenomena tersebut, karena hadirnya *life style jilboobs* berawal dari faktor makro sosial dan mikro individual dalam masyarakat.¹⁸ Sehingga memunculkan perbedaan pola, logika, dan perilaku dalam menyikapi arus besar *fashion* jilbab yang sudah ada.

Teori politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994.¹⁹ Menurut Abdilah Ubed, Politik identitas dibangun atas basis etnis, diawali oleh kesadaran untuk mengidentikan diri ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran inilah yang memunculkan solidaritas pengelompokan tersebut, sehingga eksklusivitas menjadi tidak terhindarkan.²⁰ Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (*political of identity*).

¹⁸ Makro lingkungan” mengacu pada budaya, ekonomi, demografi penduduk, politik, nilai-nilai kelembagaan, lingkungan fisik, kelas sosial, kasta, dan ras; “mikro individual” meliputi interaksi interpersonal, percakapan, media, dan interaksi rutin. Menurut Gerald Adams dan Sheila Marshall, dalam artikel Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese.*, hlm. 111.

¹⁹ Abdilah Ubed, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Indonesia: Malang, 2002), hlm.16-17.

²⁰ *Ibid.*,

Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Cressida Heyes memberi definisi politik identitas yang sangat jelas. Menurutnya politik identitas adalah aktivitas dalam arti luas. Secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum yang terpinggirkan’ dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat.²¹

Merujuk Eriksen, timbulnya perasaan untuk berkumpul pada identitas yang sama seperti etnisitas berdasarkan pada kecenderungan di dalam setiap kumpulan manusia. Guna membedakan antara orang dalam dan orang luar, serta menarik garis batas sosial, dan kecenderungan untuk membangun stereotip-stereotip tentang “kumpulan lain”. Kecenderungan membangun stereotip-stereotip tentang kumpulan lain ini juga sebenarnya merupakan cara untuk mendukung dan membenarkan garis batas sosial ini. Eriksen menekankan bahwa etnisitas muncul ketika “perbedaan-perbedaan kultural yang dipersepsikan akan berakibat pada perbedaan sosial” (*ethnicity occurs*

²¹ Cressida Heyes. *Identity politics*. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy <<http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/>>.

when perceived cultural differences make a social difference). Etnisitas muncul karena adanya interaksi dari kumpulan-kumpulan yang merasa “berbeda”, ketika pembedaan “kita” dan “mereka” menjadi penting.²²

Sedangkan menurut Buya Syafi’i Ma’arif, politik identitas secara substantif menyangkut masalah kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.²³ Seperti halnya kelompok *jilboobs*, mereka tentunya tidak menginginkan adanya diskriminasi dan juga pandangan stereotip mengenai model busana mereka. Disini isu mengenai keadilan, egalitarian, dan juga persepsi publik menjadi penting untuk didiskusikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial.²⁴ Tidak terpaku pada hasil-hasil survei ataupun data statistik yang ada. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

²²Thomas Hylland Eriksen “*Ethnic Identity, National Identity and Intergroup Conflict: The Significance of Personal Experiences*” (In R. Ashmore et al., eds., *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, 2001) Oxford: Oxford University Press, hlm. 43-63.

²³ Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 5.

²⁴ Hamid patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Model penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan atau observasi penulis di lapangan. bukan hanya itu, data juga mungkin dikumpulkan dari beberapa tulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk buku, jurnal, opini dan lain sebagainya. Tentunya yang sekiranya patut dan relevan dengan problematika yang disajikan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penulis mendeskripsikan permasalahan atau variabel²⁵ antara fenomena *jilboobs* dan politik patriarki ala Indonesia. Kemudian penulis analisa bagaimana fenomena *jilboobs* berubah menjadi *life style* dikalangan remaja ditengah strootip mengenai fenomena ini. Sehingga terungkap keterkaitan antara fenomena tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan antropologi. Dimana fenomena *jilboobs* yang berkembang mejadi *fashion* dan *life style* dipandang sebagai suatu kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang memiliki

²⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet.ke-4 (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012), hlm. 104.

kebenarannya sendiri. Bukan untuk menghakimi fenomena tersebut, melainkan untuk menjelaskan gejala-gejala *life style jilboobs* yang memiliki hubungan dengan fenomena munculnya (fatwa MUI) dalam interaksi masyarakat.²⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Data yang dihadirkan dari pengamatan langsung dilapangan dan atau juga menggunakan teknik wawancara. Selain itu, juga berasal dari sumber sekunder semisal buku atau karya ilmiah yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

Penulis membatasi lapangan yang menjadi sumber data penelitian ini. Sumber primer penulis dapatkan dari penelitian langsung dikawasan UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta dan sekitarnya yang penulis anggap sebagai pusat estetika, budaya, dan mode yang berbau Islami. Selain itu mengingat Yogyakarta selain sebagai kota wisata budaya, juga sebagai kota pelajar. Sehingga tak jarang banyak remaja yang statusnya sebagai pelajar atau mahasiswi banyak terjangkit virus *jilboobs*.

²⁶ Koentjara Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 53.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, baik primer atau skunder, maka data tersebut dianalisis dengan model analisis induktif. Analisis induktif berpijak pada data sebagai langkah awal yang kemudian diteliti dengan tujuan mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang lebih bersifat umum.²⁷ Kemudian data dianalisis menggunakan teori politik identitas, yaitu bagaimana suatu fenomena sosial dapat membentuk identitas baru. Kemudian identitas tersebut dalam perjalanannya kurang mendapatkan respon positif. Sehingga hal ini memberikan ruang justifikasi dan standarisasi yang sifatnya stereotip dan patriarki. Sebab penilaiannya menggunakan sudut pandang yang penulis anggap konservatif. Sehingga kita dapat melihat dan menilai apa sebenarnya politik identitas yang ada dibalik fenomena ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan penelitian ini dalam beberapa bab pembahasan, terkait dengan permasalahan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Bab I, dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II, dibahas mengenai gambaran umum

²⁷ H. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 27.

konstelasi jilbab di Indonesia. Bab III, dibahas mengenai permasalahan umum fenomena *jilboobs* bagi Mahasiswi, dan kaitannya dengan fatwa MUI, serta data-data yang didapatkan langsung dari lapangan. Selanjutnya Bab IV, dibahas mengenai analisis, bagaimana fenomena *jilboobs* bertransformasi menjadi *life style* dan akhirnya memunculkan politik identitas tertentu yang melekat pada remaja muslimah, serta menghubungkannya dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang haramnya *jilboobs* dalam kacamata teori (analisis). Terakhir bab V, berisikan tentang kesimpulan terhadap hasil analisis, serta memuat saran-saran yang kiranya relevan dan diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

BAB II

JILBAB DI INDONESIA

A. Sekilas Tentang Jilbab di Indonesia

Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.¹ Pakaian sebagai busana akan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Ia selalu mengalami daur ulang, bertransformasi, dan variatif mengikuti zamannya. Dengan begitu dari pakaian yang dikenakan sering kali dapat diketahui identitas diri pemakainya.² Oleh karena itu, masalah pakaian adalah masalah kemanusiaan terkait harkat dan martabat manusia, yang mana berpakaian terkait kewajiban umat islam menutup aurat.³

Pada zaman modern begitu banyak mode pakaian yang diciptakan untuk kaum adam maupun kaum hawa. Mulai dari yang sempit hingga yang longgar, baik yang berbahan sederhana hingga yang mahal. Terutama kaum hawa yang biasanya dijadikan objek komoditi sebuah produk mode, pakaiannya didesain sangat variatif dan *fashionable*. Mulai dari mode yang

¹ K.H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 294.

² Sururin, "Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur'an", dalam Majalah *AULA*, No. 04/Th.XXII (April 2000), hlm. 63.

³ Menurut bahasa aurat adalah celah, kekurangan, dan sesuatu yang memalukan. Warson Munawir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 984.

terbuka menampilkan perhiasannya, lalu yang sangat sempit yang menonjolkan *sex appeal*-nya sampai pada mode yang sangat tertutup.⁴

Relevansi jilbab dalam konteks keindonesiaan tidak pernah lepas dengan perpolitikan. Fenomena tersebut terindikasi ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai di tempat-tempat umum maupun sekolah-sekolah umum.⁵ Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh lapisan masyarakat. Fenomena jilbab memaksa pemerintah memunculkan aturan-aturan hukum, mulai dari Perda-perda yang mengatasnamakan Syaria't Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari Intruksi Walikota Padang pada tahun 2005 yang mewajibkan pemakaian jilbab dan busana islam. Perda Kota Tangerang, Gorontalo, Daerah Otonomi Khusus Nangro Aceh Darusalam (NAD), Tasikmalaya tahun 2001, Cianjur tahun 2001, Solok tahun 2002, Maros tahun 2002, Bulukumba tahun 2003, dan daerah lainnya yang semuanya mengarah pada kewajiban pemakaian jilbab.⁶

Jilbab semakin mengukuhkan kuasa laki-laki atas perempuan. Jilbab adalah “perpanjangan” nafsu laki-laki untuk “memenjara” kaum perempuan.⁷

⁴ Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan permasalahannya*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I, 1984), hlm. 3.

⁵ Sriharini, “Jilbab dan Kiprah Perempuan dalam Sektor Publik”, dalam *Jurnal PMI*, Vol. VI. No. 1, (September, 2008), hlm. 34.

⁶ Ulil Abshar, “Syari'at Islam di Jalur Lambat”, dalam *Majalah Tempo*, No. 11/XXXV/ edisi 8-14 Mei 2006, hlm. 29.

⁷ Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab* (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 8-9.

Pro-kontra seputar pemakaian jilbab kembali mencuat. Munculnya fatwa MUI yang memberikan standarisasi jilbab syar'i semakin memperjelas budaya patriarki yang masih kental dalam urusan wanita. Konstelasi dan persepi jilbab Indonesia mengalami pasang surut, terpengaruh arus mode dari globalisasi dan modernisasi. Bagaimana wanita mengembangkan ekspresinya di ruang publik yang plural akan pemahaman sektarian dan patriarkis semakin menarik untuk dikaji, terutama tentang jilbab.

B. Tren *Jilboobs* di Indonesia

Seperti wanita pada umumnya, wanita muslim ingin terlihat menarik secara fisik. Tak jarang sebagian mereka banyak juga yang ingin terlihat saleh. Kedua hal tersebut dalam kacamata syari'ah sering dianggap bertentangan. Tampil menarik secara fisik dan kesalehan agama bagi wanita muslim merupakan sesuatu yang sulit untuk diaplikasikan secara bersamaan.⁸ Berbeda halnya dengan pria, tampil maskulin dan terlihat saleh bisa dengan berbusana apa saja asalkan menutupi aurat. Bagaimana wanita mensiasati agar bisa melakukan keduanya secara bersamaan sangat menarik untuk dikaji, seperti halnya tren jilbab modis yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks kekinian, seiring dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, penggunaan jilbab semakin bertambah banyak dengan model yang beragam. Hal ini terlihat di lingkungan peneliti sendiri,

⁸ Julia Suryakusuma, "Jilboobs: A Storm in a D-cup", dalam kolom opini koran *Jakarta Post*, 20 agustus 2014, hlm.12.

mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kampus, lingkungan pergaulan, hingga tempat-tempat umum. Bahkan dalam lingkungan tertentu jilbab menjadi milik komunitas yang bersifat eksklusif dan berada pada suatu strata sosial tertentu pula.

Awalnya jilbab di Indonesia (terutama di kota-kota besar) hanya dianggap sebagai simbol kaum “*pinggiran*”⁹ dan masih menjadi minoritas dalam struktur masyarakat. Kenyataannya sekarang jilbab menjadi fenomena gaya hidup dan menjadi tren tersendiri. Sebagai sistem simbol yang memiliki makna, jilbab menjadi ciri yang dapat menjelaskan “siapa” seseorang di dalam masyarakat serta membedakannya dengan individu lain, sehingga jilbab menjadi identitas yang melekat pada diri seseorang. Pada saat jilbab diaplikasikan ke dalam suatu kelompok, maka jilbab menjadi ciri dari kelompok tersebut dan menjadi identitas sosial di dalam masyarakat yang membedakannya dengan kelompok lain. Bahkan menurut fromm (1947), meski identitas diri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial seseorang dalam konteks komunitasnya.¹⁰

Tren *jilboobs* diduga muncul dari persilangan globalisasi, syari’ah, dan gaya hidup wanita. Karen E. washburn (Monika Eviandaru: 2001) menyebut fenomena seperti itu sebagai *pop culture* (budaya populer). Bahkan melalui

⁹ Suzanne Brenner, “Recontrucsing Self and Society: Javanese Muslim Women and The Veil” dalam *Journal of The American Ethnological Society*, (University of Calivornia, 1996), hlm. 673-697.

¹⁰ Idham Putra, *Teori Identitas Sosial*, 2008. Idhamputra.wordpress.com.

penelitiannya yang diperoleh berdasarkan tiga profil perempuan Jawa sebagai objek penelitiannya, Washburn memperoleh makna jilbab, sebagai:¹¹

1. Bentuk lambang identifikasi orang Islam dengan cara pemakaian yang beragam
2. Arti personal yang tidak memiliki arti khusus, tetapi justru dapat membawa diskriminasi terhadap perempuan
3. Bentuk transformasi personal dan total.

Globalisasi menyumbang terciptanya budaya homogen dan sinkronisasi selera, konsumsi dan gaya hidup, serta sekaligus memperdalam laju penetrasi kekuatan-kekuatan nilai-nilai modern dan demokrasi.¹² Ditandai dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi dan budaya nasional, serta intervensi lintas budaya yang kian memperburuk keadaan sosial. Globalisasi adalah sebuah proses mencairnya batas-batas politik dan budaya negara bangsa yang sebelumnya menentukan dan menjadi rujukan utama cara-cara orang berpikir dan bertindak. Arus pergerakan orang, barang, pemikiran, gagasan seni, budaya, bahasa dan lainnya berlangsung begitu dinamis tanpa bisa dihalangi dan dibendung oleh batas-batas politik negara-bangsa.¹³

¹¹ Karen E Washburn “Jilbab, Kesadaran Identitas Post-Kolonial, dan Aksi Tiga perempuan (Jawa)” dalam Monika Eviandaru, *Perempuan Post-Kolonial dan Identitas Komoditi Global*, (Yogyakarta, 2001).

¹² Arjun Appadurai, “The Production of Locality,” dalam Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontempore: Konsep, Genealogi, dan Teori* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 154.

¹³ *Ibid.*, hlm. 103

Di sisi lain, dengan beragam konstruksi makna, jilbab pada akhirnya juga telah memasuki arena kontestasi sebagai akibat dari berbagai pengaruh eksternal, termasuk persaingan ideologi, ekonomi, komoditas industri, maupun sosial budaya. Jilbab masuk pada arena kontestasi permainan makna dan tafsir. Apakah ia simbol kesalehan, ekspresi perlawanan (resistensi), pengukuhan identitas, persembunyian simbolik, tren *fashion* pecandu gaya hidup urban (*urban life style*) atau kombinasi dari dua atau tiga hal itu atau malah di luar itu semua.¹⁴

Dinamika dan konstelasi jilbab di setiap masanya memiliki makna yang berbebeda, mengikuti ideologi dan tren komoditi yang berkembang. Demikian halnya dengan munculnya tren mode *jilboobs*. Berger dan Huntington menyebut fenomena seperti itu sebagai bentuk budaya pop global dan keagamaan populer.¹⁵ Sebenarnya *jilboobs* merupakan ekspresi kesalehan agama yang dipadu dengan tampil menarik secara fisik. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, semisal film-film yang mereka tonton yang menggambarkan bagaimana busana seorang wanita dapat menarik perhatian pasangannya, gaya hidup artis yang mereka gemari, iklan dan diskon jilbab modis, dan faktor pergaulan serta lingkungan.

¹⁴ Joko Wahyono, "HAM dan Daulat Jilbab Polwan", dalam Kolom Opini Koran *Suara Karya* (Yogyakarta, 2013), hlm. 9.

¹⁵ Peter L. Berger dan Samuel Huntington, eds., "Many Globalizations Cultural Diversity in the Contemporary World." Dalam Noorhaidi Hasan, *Islam.*, hlm. 104.

Banyak anggapan *stereotype* yang berkembang di masyarakat mengenai munculnya *fashion jilboobs*. Mulai dari anggapan identitas semu, yaitu memakai jilbab karena adanya faktor yang memaksa wanita harus mengenakannya. *Jilboobsers* menganggap model jilbab seperti *jilboobs* adalah bentuk alasan psikologis wanita berjilbab. Perempuan yang berjilbab atas motif ini sudah tidak memandang lagi jilbab sebagai kewajiban agama, namun sebagai budaya dan kebiasaan yang bila ditinggalkan akan membuat suasana hati tidak tenang. Berdasarkan motif kenyamanan psikologis tersebut, bentuk jilbab yang dikenakan disesuaikan dengan konteks dan fungsinya. Jilbab model ini dipandang sebagai jawaban terhadap tantangan dunia model yang sangat akrab dengan perempuan. Ada nilai-nilai agama yang berusaha dipertahankan dan sebagai merek dagang.

C. Fatwa MUI

Pakaian yang dikenakan menentukan identitas kita dalam relasi sosial.¹⁶ Munculnya fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi secara eksplisit mengatur bagaimana standar berbusana yang sopan dan syar'i. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.¹⁷ Hal tersebut juga pastinya

¹⁶ Sururin, *Pakaian.*, hlm. 63.

¹⁷ Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, hlm. 10.

berlaku bagi tren *jilboobs* di Indonesia. MUI mendasarkan fatwanya berdasarkan:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ، ذَلِكَ آدْنِي أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَ يُؤْذِينَ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.¹⁸

Fatwa MUI tersebut banyak menimbulkan pro-kontra, baik dari kalangan wanita dan masyarakat pada umumnya. Pendukung fatwa haram MUI akan *jilboobs* mengatakan bahwa memang seharusnya ada larangan tegas akan pemakaian jilbab yang masih menampilkan lekuk tubuh. Namun tidak sedikit yang juga bereaksi sebaliknya dan mempertanyakan apa dasar MUI mengeluarkan fatwa. Seperti salah satu contohnya dari *Twitter* yang mengatakan, ‘*Jilboobs* dilarang ok, tapi kenapa harus fatwa haram?’. Ada pula di salah satu forum terbesar di Indonesia yang mengulas *jilboobs* menuliskan, apabila *Jilboobs* difatwa haram, bagaimana dengan pemakaian rok yang terlalu ketat dan pendek seperti yang rata-rata digunakan oleh para pekerja wanita kantoran.¹⁹

Ambiguitas fenomena tersebut kemudian membuka ruang bagi kita untuk melihat lebih dalam akar permasalahan yang melatar belakangi munculnya *fashion jilboobs*. Apakah MUI dalam menjustifikasi haram

¹⁸ al-Qur’an Surah al-Ahzab ayat 59

¹⁹ Dwi Andi Susanto, “Banyak Pro-Kontra Setelah MUI Fatwa Haram Jilboobs”, dalam media kabar online, *Merdeka.com*. <http://www.merdeka.com/teknologi/banyak-pro-dan-kontra-setelah-mui-fatwa-haram-jilboobs.html>. diakses pada, 26 maret 2015.

jilboobs terlebih dahulu telah melaksanakan kajian yang mendalam lalu melakukan sosialisai pemahaman jilbab syari'i yang menutup aurat. Dalam kasus *jilboobs* wanita muslim dinilai sebagai biang pelecehan seksual yang marak terjadi di tempat-tempat umum. Mereka yang berjilbab dan berpakaian ketat dinilai lebih rentan akan pelecehan seksual, karena lelaki semakin tertarik dan penasaran terhadap wanita yang berpakaian seperti *jilboobs*, dari pada mereka yang menggunakan rok mini.

Secara keagamaan, fatwa mestinya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Karena fatwa hanya mempunyai kekuatan semacam seruan moral, atau himbauan moral. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Karena itu sifat fatwa tidak mengikat. Misalnya ada fatwa yang menganggap pemahaman orang lain kafir atau tidak sesuai syari'ah. Selama kita memahami fatwa seperti itu tidak wajib dan tidak mengikat, maka fatwa itu tidak akan memiliki kekuatan sama sekali. Lagi pula, pada asalnya kafir itu adalah stigma politis. Oleh karena itu, fatwa menjadi penting bukan karena substansi fatwanya secara keagamaan tapi karena konteks politiknya. Secara politik identitas, fatwa menjadi salah satu ritme dari peneguhan identitas. Tentu saja, identitas Islam dalam pengertian dan tujuan tertentu pula dalam konteks ini.

Wanita sebagai mahluk merdeka Secara konservatif-normatif memiliki standarisasi aturan berjilbab sebagai berikut:²⁰

²⁰ Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboobs: 101 Cara Berjilbab Sempurna* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm. 26-35.

1. Menutupi Seluruh Tubuh
2. Kain Tebal
3. Terulur sampai Dada
4. Tidak Memakai Wewangian dan Kosmetik Berlebihan
5. Tidak Menyerupai Laki-Laki
6. Bukan Popularitas
7. Tidak Menyerupai Orang Kafir
8. Tidak Berfungsi sebagai Perhiasan

Dari seluruh standarisasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya berjilbab merupakan suatu gaya busana yang seolah-olah anti modernisasi dan juga variasi lainnya. Padahal bila kita cermati lebih lanjut wanita sesungguhnya dijadikan objek komoditi mode di era modernisasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari persediaan jilbab di pusat-pusat perbelanjaan yang kian hari semakin variatif dan modis. Anomali ini begitu menarik untuk dikaji, bagaimana wanita menegosiasikan antara gaya hidup mereka dengan standarisasi MUI mengenai jilbab syar'i. Sebab tidak bisa pungkiri sebagai wanita muslim tentunya juga ingin terlihat menarik secara fisik, namun juga tidak ingin dikatakan tidak sopan.

BAB III

JILBOOBS DAN MAHASISWI

A. Makna *Jilboobs* Bagi Mahasiswi

Makna filosofis jilbab sebagai alat penutup aurat mengalami banyak reduksi ketika modernisasi masuk dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Ada banyak jawaban beragam mengenai makna *fashion jilboobs* bagi wanita, khususnya mahasiswi di lingkungan yang menjadi obyek penelitian penulis. Alasannya mulai dari alat penutup aurat, identitas diri, *self defence*, dan *fashion*.

1. Penutup Aurat

Tipologi semacam ini disampaikan secara spontan ketika penulis menanyakan makna jilbab yang dipakai oleh responden. Kebanyakan mahasiswi belum memahami makna jilbab secara benar. Mereka terbawa arus pemahaman umum bahwa model berjilbab seperti *jilboobs* juga masuk dalam kategori jilbab penutup aurat. Padahal secara umum jilbab mempunyai dua makna, yaitu makna sesungguhnya jilbab sebagai alat penutup aurat (*Hijab*) dan makna yang keliru yaitu alat pembungkus aurat.

Jilbab secara syar'i ialah yang longgar, menutup aurat, tidak berlebih-lebihan, dan tidak menampakan lekuk tubuh.¹ Namun tampak

¹ Al-A'raf (7): 31, Al-Ahzab (33): 59, dan An-Nur (24): 31.

menarik secara fisik juga menjadi dambaan mahasiswi. Kedua hal tersebut tampak saling bertentangan dan sulit untuk diaplikasikan secara bersamaan. Sedangkan ketika ditanya mengenai “apa itu aurat”, mereka menjawab aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan dijaga kehormatannya.

Alasan yang kemudian menjadi alibi mahasiswi, mereka berusaha tampil cantik dan tidak mau terkesan menjadi muslim yang kolot dan anti modernisasi. Tuntutan kesederhanaan bukan berarti anti terhadap perkembangan variasi *fashion* jilbab. Mereka mencotohkan kenapa harus ada ajang kontestasi *modeling* jilbab, ketika muslimah dituntut untuk tampil sederhana. Bagi mereka berjilbab merupakan panggilan hati dan soal kenyamanan diri. Sehingga dogma-dogma agama seperti diatas hukumnya masih bisa dinegosiasikan tergantung konteks dan kepentingan wanita menggunakannya.

Adapun mengenai diskriminasi atau pelecehan seksual tidak bisa dibenarkan sepenuhnya atas kesalahan cara berpakaian mereka. Laki-laki sebagai lawan jenis juga memiliki dogma tersendiri. Mereka dituntut untuk menundukan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan berusaha meredam hawa nafsu melalui media puasa.² Jadi ketika berbicara masalah nafsu sesungguhnya pria dan wanita memiliki kewajiban yang sama. Mode *jilboobs* tidak bisa disalahkan, karena pada hakikatnya tren tersebut

² An-Nur (24): 31.

muncul akibat arus globalisasi dan modernisasi yang tidak bisa dibendung.

Jilboobs sebagai mode yang berkembang di masyarakat merupakan salah satu bentuk dari proses pembentukan identitas, yang terpengaruh oleh faktor makro sosial dan mikro individual.³ Sehingga sangat sulit untuk menjustifikasi haram tren tersebut, sebelum masyarakat secara umum mampu menahan laju arus modernisasi yang terjadi di segala lini. Wanita dalam hal ini mahasiswi ingin terus terlihat modis dan *fashionable*. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya iklan jilbab dan diskon-diskon yang ditawarkan, sehingga mahasiswi kian tertarik dan larut dalam arus modernisasi jilbab tersebut.

Pada akhirnya permasalahan aurat menjadi sangat abu-abu, asalkan tidak menampilkan secara langsung mereka masih yakin bahwasannya aurat mereka terjaga. Hal yang menjadi krusial saat ini adalah bagaimana pria dan wanita saling menjaga pandangan dan kemaluannya. Rumitnya permasalahan seksualitas⁴ selama ini belumlah

³Menurut Gerard Adam & Sheila Marshall “Makro lingkungan” mengacu pada budaya, ekonomi, demografi penduduk, politik, nilai-nilai kelembagaan, lingkungan fisik, kelas sosial, kasta, dan ras; “mikro individual” meliputi interaksi interpersonal, percakapan, media, dan interaksi rutin. dalam tulisan Kurniawati Hastuti Dewi, *Javanese.*, hlm. 111.

⁴ Seksualitas “adalah nama yang dapat diberikan pada suatu sistem historis: bukan realitas bawahan yang sulit ditangkap, melainkan jaringan luas dipermukaan tempat rangsangan badaniah, intensifikasi kenikmatan, dorongan terbentuknya wacana, pembentukan pengetahuan, pengokohan pengawasan dan tentangan, saling berkait sesuai dengan strategi besar pengetahuan dan kekuasaan”. Istilah diambil dari Michel Foucault, *History of Sexuality*, alih bahasa Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan FIB

mampu banyak disadari oleh berbagai pihak, karena masyarakat awam, negara dan agama cenderung memandang seksualitas secara reduksionis, hitam putih, dan sederhana.⁵

Seksualitas bukan hanya mendiskusikan permasalahan ketubuhan dan libidinal, tapi juga bagian dari fenomena persoalan yang menyangkut dimensi psikologis, filosofis, kultural, bahkan politik.⁶ Bronislaw Malinowski misalnya melihat seks sebagai sebuah persoalan kultural dan sosial di mana seks dipandang lebih dari sekedar persoalan dua badaniah manusia yang saling melepas hasrat.⁷ Selain itu agama juga mempunyai konsep yang cukup mempengaruhi manusia sebagai *human sexual*. Berbagai konsep dosa seolah diturunkan ke bumi sehingga berbagai konsep mengenai *sex* pun mulai mengalami transformasi nilai, makna, dan etika.⁸

2. Identitas Diri

Hal yang paling mudah untuk mengidentifikasi seseorang adalah pakaian, dari pakaian yang dikenakan sering kali dapat diketahui identitas diri pemakainya.⁹ Jawaban sederhana yang disampaikan responden bahwa

Univeriatas Indonesia dan Forum Jakarta-Paris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 206.

⁵ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress, 2007), hlm. 9.

⁶ *Ibid.*

⁷ Malinowski, "The Sexual Life in North Western Melanesia" dalam Hatib Abdul Kadir, *Tangan.*, hlm. 9.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sururin, *Pakaian.*, hlm. 63.

jilbab yang mereka pakai merupakan simbolisasi identitas agama. Identitas tersebut yang membedakan mereka dengan wanita lain yang tidak berjilbab. Dengan jilbab yang dikenakan orang sudah dapat menebak agama pemakainya.

Identitas diri yang dimaksud disini ialah lebih kepada urusan *gender*, yaitu jilbab sebagai alat identifikasi dan simbolisasi kerendahan diri wanita. Jilbab bukan lagi perpanjangan tangan kuasa laki-laki, keterbelakangan, subordinasi, dan diskriminasi sosial.¹⁰ Hal itu merupakan bentuk Alasan psikologis wanita. Mereka berjilbab karena budaya lingkungan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga jika ditinggalkan akan membuat suasana hati tidak tenang. Kontruksi makna mengenai jilbab mengalami pergeseran dari dogmatis menjadi alasan psikologis dan sosiologis.

Identitas diri di sini merujuk pada kalangan wanita muslim yang menerima gagasan-gagasan modernisme islam.¹¹ Mengarah pada penerimaan dan apresiasi terhadap khazanah kebudayaan barat, dan pada saat yang sama melakukan puritanisasi atau pemurnian atas paham keagamaan dengan mengembalikannya pada doktrin awal al-Qur'an dan

¹⁰ Saba Mahmood, *Politics*, hlm. 23.

¹¹ Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, *Islam & civil Society: Pandangan Mulim Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2002), hlm. 13

Sunnah.¹² Identitas diri di sini menurut penulis telah mengalami percampuran antara islam dan modernitas. Sehingga melahirkan *trade mark* tersendiri yang penulis anggap sebagai politik identitas¹³ *Jilboobers*.

3. *Self Defence*

Jawaban ini sangat sulit untuk dimengerti bagi mereka yang berpandangan konservatif. Walau secara normatif memang jilbab bisa berfungsi sebagai alat *self defence*, sesuai dengan Qur'an surah al-Ahzab ayat 59.¹⁴ Alasan semacam ini muncul berdasarkan konsepsi mereka sendiri, yaitu jilbab merupakan simbolisasi Teologis sehingga mereka merasa terlindungi ketika berjilbab. Walaupun dalam kenyataannya model jilbab yang mereka kenakan banyak mendapatkan keritik publik. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya pro-kontra mengenai Fatwa haram MUI terhadap mode *jilboobs* yang telah disebutkan pada Bab II skripsi ini.

Jilboobers meyakini bahwasannya mereka juga berupaya menghadirkan atau merepresentasikan Tuhan dalam aktivitasnya sebagai Mahasiswi. Meskipun *stereotype* mengenai gaya busana mereka masih

¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern dalam Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 8.

¹³ politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan etnisitas yang memiliki *trade mark* (merek dagang) yang diperjuangkan dalam relasi sosialnya, kemudian eksklusivitas tak terhindarkan. Lihat Thomas Hylland Eriksen "*Ethnic Identity*.", hlm. 43-63.

¹⁴ Ayat tersebut menjelaskan fungsi Jilbab sebagai alat pengenalan (Identifikasi) yang membedakan antara muslimah dan hamba sahaya dari kaum kafir, sehingga muslimah tidak akan diganggu bila berpergian dari rumah.

begitu nyaring terdengar. Gejala semacam ini oleh Asef Bayat disebut sebagai Post-Islamisme, yaitu berusaha menghadirkan simbol agama dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi.¹⁵ Sehingga justifikasi haram mengenai model busana mereka menjadi semakin abu-abu. Anggapan mereka *fashion jilboobs* dikenakan untuk mencari pahala, yaitu kuliah sebagai mahasiswi.

Jilbobers juga yakin bahwa hal seperti di atas harus diatur menurut ilmu pengetahuan manusia. Sehingga aplikasi sebuah aturan syari'ah tidak hanya dibaca dan dipahami secara tekstual. Ahmed Vaezi menyebutnya sebagai proses rasionalitas dan sebuah konsep *extra religius* dari hak-hak manusia, ketimbang melalui jurisprudensi islam.¹⁶ Sehingga pemaknaan *self defence* menjadi lebih pantas dan relevan untuk dijadikan alasan. Pandangan demikian mengingatkan kita pada pandangan Abdul Karim Soroush yang memisahkan antara agama (*religion*) dan pengetahuan agama (*religious knowledge*). Kalau agama adalah kebenarannya tidak bisa diganggu gugat, sedangkan pengetahuan akan

¹⁵ Asef Bayat, "What is Post-Islamisme". Lihat juga Asef Bayat, "Making Islam Democratic, Social Movement and the Post-Islamist Turn" dalam Noorhaidi Hasan, "Piety, Politics, and Post-Islamism: *Dhikr Akbar* in Indonesia, Dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, vol. 50, No. 2, 2012, hlm. 381.

¹⁶ Ahmed Vaezi, Agama Politik: *Nalar Politik Islam* (judul asli: *Syi'ah Political Thought*), (Terj.) Ali Syahab (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 46.

agama adalah bentuk penafsiran seseorang terhadap agama tersebut, yang kebenarannya sangat relatif dan bisa diperdebatkan.¹⁷

4. *Fashion*

Layaknya remaja wanita pada umumnya, *Jilboobers* merasa jenis jilbab yang dikenakan akan mempengaruhi aktivitasnya dalam relasi sosial. Mobiltasnya dalam ruang publik begitu terpengaruh dengan apa yang mereka kenakan sebagai pakaian. Pakaian tertutup layaknya wanita bercadar, berjubah besar, dan berjilbab panjang dinilai mobilitasnya akan terbatas. Berbeda dengan *Jilboobers*, mereka memiliki ruang gerak yang lebih, karena bentuk jilbab yang mereka kenakan. Mereka seakan tidak mempunyai batasan ruang dan waktu dalam relasi sosialnya. Mereka dapat kita jumpai di tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan, karaoke, cafe, tempat wisata, dan setiap tempat di sudut-sudut keramaian kota. Berbeda dengan wanita bercadar dan berhijab panjang, ruang gerak dan waktu beraktifitasnya cenderung terbatas.

Jilbab sebagai produk dari *fashion*, jilbab model ini sebagai jawaban terhadap tantangan dunia model yang sangat akrab dengan perempuan. Ada nilai-nilai agama yang berusaha dipertahankan dan sebagai merek dagang. Munculnya *outlet-outlet* dan acara-acara peragaan busana muslimah mampu menghadirkan model jilbab dan busana

¹⁷ Abdul Karim Soroush, "Reason and Democracy in Islam." dalam Asma Barlas, *Believing Woman in Islam*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 12.

muslimah yang semakin variatif. Jilbab modis (*jilboobs*) yang dikenakan juga sangat mempengaruhi perilaku wanita. Batas-batas pergaulan wanita dan pria tidak lagi memiliki sakralitas. Muda-mudi muslim tidak lagi memandang tabu dogma mengenai batasan hubungan sebelum sah dengan status pernikahan.

Bentuk ambiguitas yang terkandung dalam sikap manusia adalah konsepsi mereka tentang seksualitas. Pada satu sisi, dipandang bahwa seksualitas mempunyai magnet yang mampu mengundang daya tarik (*interest*), rasa ingin tahu (*curiosity*), sesuatu yang indah, dan menyenangkan. Namun disisi lain seksualitas juga dipandang dengan rasa penuh kecurigaan (*suspicious*), menjijikan, aib, hingga pantas di jauhi. Problematika seksualitas tak dapat hanya dipandang sebagai sesuatu yang terfragmen secara parsial. Seks tak hanya punya nilai liar dan negatif dalam memperbudak tubuh dan libido semata. Pandangan seks secara libidinal dan parsial hanya akan menggiring manusia ke dalam perbudakan tubuh dan nafsu.¹⁸

B. Pandangan *Jilboobs* Terhadap *Qiwama*

Islam tidak harus dibaca sebagai agama (para) Ayah, yaitu sebagai agama patriarkis, jika yang kita maksud dengan patriarki adalah kekuasaan ayah dan atau politik pengistimewaan laki-laki yang didasarkan pada teori-

¹⁸ Hatib Abdul Kadir, *Tangan.*, hlm. 16.

teori perbedaan *gender*.¹⁹ Kedua bentuk patriarki itu mengaitkan laki-laki (maskulin) dengan diri, pengetahuan, kebenaran, dan kedaulatan, sambil menggambarkan perempuan sebagai sosok yang berbeda, tidak setara, atau yang lainnya.²⁰ Gagasan ketuhanan dari suatu budaya merupakan hal sentral bukan saja bagi kehidupan keagamaan budaya itu, tapi juga bagi pelbagai institusi dan relasi keluarga, sosial, dan politiknya,²¹ maka cara kita mendefinisikan Tuhan memiliki dampak bukan saja pada sistem patriarki tapi juga pada teologi dan hermeneutika pembebasan.²²

Hal di atas terindikasi dari Fatwa haram MUI mengenai haramnya model jilbab yang masih menampilkan lekuk tubuh.²³ Kekhawatiran Asma Barlas di atas kian nyata melalui representasi Tuhan berupa institusi agama yang didalamnya syarat akan kepentingan laki-laki. Hal tersebut bisa kita lihat dari struktural kelembagaan yang sebagian posisi pentingnya dikuasi oleh laki-laki. Pro-kontra mengenai fatwa haram *jilboobs* masih terasa di lingkungan yang menjadi objek penelitian ini. Mahasiswi yang kuliah dibawah naungan institusi agama juga menanggapi beragam mengenai fatwa haram tersebut.

¹⁹Asma Barlas, *Believing Woman in Islam*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 181.

²⁰Zillaeh Eisenstein, "Feminism and Sexual Equality: Crisis in Liberal America" dalam Asma Barlas, *Believing.*, hlm. 181.

²¹Anne McGrew Benner, "From Woman-Pain to Woman-Vision" dalam Asma Barlas, *Believing.*, hlm. 182-183.

²² *Ibid.*

²³ Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, hlm. 10.

Bahkan lebih dari itu, MUI mendasarkan fatwanya dari permasalahan Pornografi dan Pornoaksi,²⁴ yang artinya model berpakaian *jilboobs* wanita muslim menjadi pemicunya. Berdasarkan wawancara dan penelitian yang telah dilaksanakan, hanya sedikit sekali responden yang menerima fatwa tersebut dengan alasan antisipatif, preventif, dan edukatif. Namun, respon sinis mengenai fatwa haram tersebut lebih besar dan menarik untuk dikaji. MUI dinilai keliru mengeluarkan fatwa haram karena model pakaian mereka merupakan bentuk *pop culture*²⁵ yang tidak bisa diantisipasi, baik oleh MUI sebagai institusi agama dan juga pribadi mahasiswi. MUI terlalu sederhana, reduksionis, dan hitam-putih dalam melihat permasalahan aurat (seksualitas), tanpa terlebih dahulu mengkaji dan mempertimbangkan faktor modernisasi dan globalisasi sebagai pemicunya.²⁶

John Stuart Mill dalam *A System of Logic* menjelaskan, harus ada standar untuk menentukan baik-buruknya, mutlak-komparatifnya tujuan atau objek hasrat. Dan apa pun standar itu, hanya ada satu: karena bila ada beberapa prinsip utama untuk perilaku yang sama mungkin akan disetujui oleh salah satu prinsip tersebut, tetapi disalahkan oleh prinsip yang lain, dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Pop Culture* adalah nama lain dari budaya populer yang dihasilkan dari pesilangan antara globalisasi, modernisasi, dan gaya hidup, Tulisan Karen E Washburn tentang: “Jilbab, Kesadaran Identitas Post-Kolonial, dan Aksi Tiga perempuan (Jawa)”, dalam buku: Monika Eviandaru, 2001, *Perempuan.*, Hlm. 1-148.

²⁶ Peter L. Berger dan Samuel Huntington mengidentifikasi empat proses budaya yang terjadi secara simultan dalam globalisasi; budaya bisnis internasional, budaya intelektual dunia, budaya pop global dan budaya keagamaan populer. Dalam Noorhaidi Hasan, *Islam.*, hlm. 104.

akan diperlukan prinsip-prinsip lain yang lebih umum untuk menjadi penengahnya.²⁷

Indonesia merupakan negara yang dibuat sedemikian rupa dengan aparatus yang mendominasi menciptakan adanya berbagai sensor dengan inti mencoba mengaseksualkan masyarakat dengan berbagai dalil moral hingga keamanan.²⁸ Dogma-dogma mengenai kesalehan dan kesederhanaan begitu ditekankan dalam bentuk pakaian wanita. Wanita dalam hal ini semakin nyata menjadi makhluk subordinat setelah laki-laki. *Jilboobers* yakin bahwasannya islam harus kompatibel dengan modernitas, sehingga model pakaian mereka tidak terlalu dipermasalahkan oleh kaum adam. Karena secara hirarkis, Allah SWT terlebih dahulu mewajibkan laki-laki untuk menahan hawa nafsunya lewat Qur'an Surah al-A'raf ayat 30, lalu ayat 31 wanita dituntut untuk berpakaian sopan.

***Qiwama* Sebagai Landasan Doktrinal**

Kunci utama untuk menampilkan wajah islam yang egaliter adalah dengan membaca kembali Alqur'an. Dalam membaca al-Qu'ran, seseorang akan disuguhi oleh pelbagai kemungkinan hasil pembacaan. Mereka yang membaca al-Qur'an dengan kaca mata patriarkis, maka makna yang dihasilkan dari bacaan model ini sudah barang tentu sangatlah patriarkis.

²⁷ Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory*, (terj.) Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 548.

²⁸ Hatib Abdul Kadir, *Tangan.*, hlm. 10.

Asma Barlas tidak pernah menolak kenyataan di masyarakat Islam yang menggunakan cara baca seperti di atas. Namun, menurutnya apa yang penting dikemukakan adalah cara di atas terkadang menutup cara baca lainnya, yaitu cara baca yang egaliter. Menurut Barlas, seluruh teks pada dasarnya adalah polisemik, terbuka untuk segala macam bacaan. Barlas berpendapat perlu membaca al-Qur'an secara historis, dan bagaimanakah cara membaca al-Qur'an tersebut, dalam hal ini, bagaimana mereka memilih epistemologi dan metodologi (hermeneutika). Selain aspek epistemologi dan metodologi, hal yang perlu dilihat juga adalah bagaimana peranan masyarakat penafsir dan juga negara dalam membentuk pengetahuan dan otoritas keagamaan yang memungkinkan mereka menerapkan bacaan al-Qur'an.²⁹

Susan Moller Okin (1991) menerangkan, gerakan feminis baru dari tahun 1970-an menyebabkan upaya pemisahan tradisional antara ranah domestik dan publik. Isu sentral perjuangan tersebut tergambar dalam semboyan '*the personal is political*' yang personal itu politis. Bagi beberapa feminis masa itu, semboyan tersebut mengacu pada keinginan untuk membebaskan perempuan dengan menekan keluarga, karena keluarga dianggap sebagai sumber penindasan perempuan. Dewasa ini, kebanyakan feminis menolak sikap ekstrem ini, tetapi mengakui dampak penting dari relasi kekuasaan yang tak sama di dalam keluarga itu. Namun, solusi mereka

²⁹ Asma Barlas, *Believing.*, hlm. 181-205.

bukanlah menghapus keluarga, melainkan mendemokratisasikannya. Dalam proses tersebut mereka mengakui relevansi keberadaan dua ranah terpisah tersebut.³⁰

Hal tersebutlah yang kemudian masih tertanam dalam benak para *Jilboobers*, mereka sendiri masih mengakui perbedaan antara yang 'domestik' dan 'publik'. Tetapi *Jilboobers* tidak memandang hal tersebut secara berlebihan atau terlampaui sakral, sejalan dengan pendapat Okin di atas perlu ada pendemokratisasian ke dua ranah itu. Hal tersebut terutama dalam urusan sosial dan ekonomi, *Jilboobers* percaya bahwa pria merupakan simbolisasi otoritas Tuhan. Model jilbab mereka merupakan jawaban dari pendemokratisasian tersebut. Kewajiban memakai jilbab bermula dari paksaan keluarga (terutama ayah). Namun, bagaimana model dan cara berjilbab yang benar (syar'i) mereka formulasikan sendiri sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka dalam relasi sosial. Mode *jilboobs* merupakan bentuk sintesis antara resistensi dan sikap pasrah mereka dalam keluarga, karena bagaimanapun sulit untuk merubah seseorang dari yang mulanya tidak berjilbab menjadi berjilbab.

Untuk membuktikan perlunya memperhitungkan ranah pribadi, Anne Philips memusatkan perhatian pada konsep demokrasi. Ia berpendapat bahwa konseptualisasi partisipasi demokratis tanpa memperhitungkan batasan-batasan pada ranah pribadi akan menghasilkan pandangan yang kelewat

³⁰ Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook* ., hlm. 636.

sempit terhadap demokrasi. Ia mengkritik pendekatan-pendekatan tradisional terhadap demokrasi karena mengabaikan sifat relasi kekuasaan yang hanya memihak satu *gender* tertentu seputar seks, cinta, dan ilmu ekonomi di dalam keluarga. Bagi isu-isu keadilan sosial, ketidaksetaraan di dalam keluarga sama relevannya dengan ketidaksetaraan di dalam ranah publik. Philips berpendapat bahwa demokratisasi di ranah publik dipahami sebagai lebih tingginya partisipasi perempuan di ranah ini, dan tidak mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu mendemokratisasi ranah pribadi. Dalam hal ini, demokratisasi ranah pribadi bukan hanya cara untuk mencapai tujuan-tujuan kewarganegaraan politik aktif, tetapi juga sebuah nilai. Dengan demikian, Philips mendukung konseptualisasi demokrasi yang meliputi relasi kekuasaan di ranah pribadi.³¹

C. Pandangan *Jilboobers* Terhadap Hijab *Syar'i*

Jilbab dalam perkembangannya mengalami banyak transformasi dan syarat akan makna. Jilbab bukan sekedar mode, ia bisa juga sebagai bentuk resistensi dan pergerakan kelompok-kelompok tertentu dalam memperjuangkan sesuatu. Hal tersebut bisa kita jumpai misalnya ketika ada demonstrasi mahasiswa di jalan-jalan protokol perkotaan. Jilbab sering dijadikan alat untuk menyampaikan sesuatu yang syarat akan makna politis.

³¹ Anne Philips, "Feminism and Politics" dalam Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook*., hlm. 637-638.

Aktivis perempuan (muslimah) mempunyai peran penting dalam menegosiasikan posisi mereka dalam konstelasi sosial-politik di Indonesia.

Berdasarkan sejarah hal tersebut terbukti benar, Waylen (1998) menyebutkan perbedaan pola pergerakan feminisme dari aliran sosialis hingga radikal. Feminis sosialis terutama mengintegrasikan penindasan terhadap perempuan kedalam perspektif marxis. Akibatnya, mereka melihat negara sebagai instrumen dominasi di tangan kelas yang berkuasa, dan menegaskan pentingnya peran perempuan dalam mereproduksi angkatan kerja di dalam keluarga demi perkembangan kapitalisme. Seperti feminis sosialis, feminis radikal seperti Cathrine MacKinnon juga mengonseptualisasikan negara liberal sebagai entitas monolitik yang melembagakan kepentingan kelompok dominan, terutama lewat hukum; hanya kali ini kelompok dominan itu bukan kelas borjuis seperti digambarkan teoritikus marxis, melainkan kategori warga pria. Sistem hukum liberal, politik arus kuat, dan negara dilihat sebagai instrumen subordinasi perempuan oleh laki-laki, juga instrumen kepentingan pria sebagai kepentingan umum.³²

Hijab syar'i identik dengan organisasi-organisasi tertentu dalam lingkungan universitas. Umumnya mereka terjun dan aktif dalam pergerakan yang syarat akan muatan-muatan politis. Berbeda dengan *Jilboobers*, mereka tidak mempunyai wadah atau kelompok formal dalam relasi sosialnya. Penulis hanya menemukan kelompok *cyber* yang mengatasnamakan *jilboobs* sebagai

³² Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook.*, hlm. 633.

suatu komunitas di jejaring sosial, misalnya *facebook*, *tweeter*, *instagram*, *path*, dan sosial media lainnya. *Jilboobers* hanya sekedar ungkapan gramatikal bagi mereka yang berjilbab namun mengenakan pakaian ketat. Perbedaan tersebut menarik untuk dicermati, mengapa hijab syar'i mampu mengelompokan diri secara resmi, sedangkan *jilboobers* hanya menjadi kelompok semu yang ada di dunia maya. Namun, dalam bahasan dan karya tulis yang berbeda pula.

Jilboobers sebenarnya paham dan tau apa itu hijab syar'i, mereka juga mengakui bahwasanya model berjilbab mereka kurang syar'i. Namun status mereka yang masih boleh dikatakan remaja membuat hijab syar'i belum pantas untuk dikenakan. Alasan utamanya adalah hijab syar'i dinilai kurang nyaman digunakan untuk *hang out* dan kurang menarik secara fisik. *Jilboobers* memandang hijab syar'i lebih pantas jika digunakan dalam forum-forum diskusi dan pergerakan di kampus-kampus. Hijab syar'i dinilai syarat akan muatan ideologi, pergerakan, dan kaderisasi kelompok-kelompok tertentu.

Awy A. Qolawun dalam bukunya “ Dari *Jilboobs* Hingga Nikah Beda Agama” menjelaskan hijab syar'i secara sempit. Awy hanya memandang hijab syar'i sebatas sebagai pakaian, tanpa memandang proses bagaimana wanita muslimah mengenakannya dan apa motif dibalik hijab tersebut. Hijab syar'i bukan bentuk identifikasi bangsa mana atau gerakan apa tetapi yang memenuhi tiga syarat, yaitu menutup aurat, kain yang dipakai tidak transparan

dan model pakaian yang dikenakan tidak mengilustrasikan bentuk tubuh muslimah.³³

Jilboobs dan Moralitas

Secara definitif moralitas merupakan seperangkat nilai, peraturan, dan tindakan yang diajukan terhadap individu dengan dipersyaratkan oleh beberapa agen atau penentu standar moralitas seperti keluarga, institusi pendidikan, agama, dan sejenisnya. Moralitas yang berbeda pada setiap latar belakang ruang dan waktu mampu menjadi sebuah elemen pengontrol dalam suatu masyarakat.³⁴

Setidaknya terdapat dua elemen yang mendasari dari sikap yang berbeda terhadap pemaknaan moralitas yakni *codes of behavior* dan *from of subjectivication*. Dua pandangan inilah yang kemudian menjadi parameter, yang menentukan seksualitas yang “bermoral” dan yang tidak bermoral. Dalam seksualitas, individu diwajibkan mengikut pada penentuan dari sebuah substansi etik yang berdasar moralitas/*determination of etichal substance*. Hasil dari adanya keseragaman moralitas, tentu berangkat dari niatan individu yang berbeda. Kristalisasi moralitas merupakan hasil dari berbagai konformitas

³³Awy A. Qolwun, *Dari Jilboobs Hingga Nikah Beda Agama* (Jakarta: Mizania, 2015), hlm. 108-113.

³⁴Hatib Abdul Kadir, *Tangan.*, hlm. 36.

antara peraturan, hukum, nilai, serta tawar menawar antara diri dengan realitas lapangan.³⁵

Hal tersebutlah yang kemudian belum terjadi dalam proses penjustifikasian haram tentang *jilboobs* oleh MUI. Aspek-aspek yang menjadi substansi justifikasi MUI belum terpenuhi secara sempurna. Fatwa tersebut dinilai prematur tanpa terlebih dahulu melihat aspek peraturan negara, hukum islam, nilai, serta tawar menawar wanita (*Jilboobers*) dengan realitas lapangannya. Seharusnya MUI melakukan kampanye atau pembelajaran terlebih dahulu mengenai hijab syar'i, karena fakta dilapangan sebagian besar responden tidak mengetahui fatwa tersebut.

Awy memberikan gambaran sederhana mengenai korelasi antara jilbab dan kesalehan (moralitas). Awy berpendapat berjilbab tidak ada hubungannya dengan akhlak dan moralitas secara langsung. Dalam pandangan masyarakat wanita berjilbab selalu diidentikan sebagai wanita yang santun, rajin shalat, rajin bersedekah, sering hadir di pengajian, dan berbagai predikat kesalehan lainnya. Akibatnya, jika ada wanita berjilbab melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan persepsi jilbab yang dikenakannya maka sebagian besar masyarakat langsung mengaitkannya dengan jilbab yang dia kenakan.

³⁵Michel Foucault, *History of Sexuality*, alih bahasa Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan FIB Univeriatas Indonesia dan Forum Jakarta-Paris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 75-88.

Tindakannya itu dinilai tidak sesuai dengan jilbabnya. Lantas muncullah suara miring seperti, “Pakai jilbab, tapi kelakuannya seperti itu.”³⁶

Karena hal inilah, dampaknya adalah sebagian muslimah yang belum berjilbab memilih tetap bertahan pada pilihannya untuk tidak mengenakan jilbab. Mereka berpikiran sangat sederhana, “Daripada tidak bisa menjaga sikap saat mengenakan jilbab, lebih baik aku tidak mengenakannya, biarlah aku menjilbabi hatiku terlebih dahulu (nanti saja pakai jilbab kalau sudah tua, mau wafat)”. Atau muncul slogan unik, “lebih baik pakai rok mini tapi bermental jilbab, daripada pakai jilbab tapi bermental rok mini.”³⁷

³⁶ Awy A. Qolwun, *Dari*, hlm. 103-104.

³⁷ *Ibid.*

BAB IV

JILBOOBS: ANTARA FASHION DAN SYARI'AH

A. Faktor Makro Sosial dan Mikro Individual

Mencermati faktor perkembangannya, jilbab sebenarnya berkembang sebagai bagian dari dinamika pencarian identitas. Ia dalam banyak hal merupakan protes politik yang terbalut dengan simbol-simbol dan wacana agama. Di tengah dominasi sistem politik gaya Barat yang sekuler, isu tentang *gender* dan simbol-simbolnya kembali mencuat ketika dihadapkan dengan paham politik pengistimewaan *gender* tertentu. Persoalan *gender* bukanlah cerita tentang keberhasilan. Ia lebih merupakan episode-episode kegagalan yang kerap berakhir dengan fragmentasi atau kelumpuhan akibat represi dari negara. Jilbab sebenarnya merupakan upaya islamisasi ruang publik, ia bisa berangkat dari bawah melalui dakwah dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial keagamaan dan islamisasi dari atas yang mengambil wujud otoritas keagamaan.

Faktor-faktor mengenai pola perilaku dan motif dibalik wanita mengenakan jilbab sangat menarik untuk dikaji. Mencermati perkembangan jilbab di Indonesia hingga munculnya *fashion jilboobs* tidak terlepas dari beberapa faktor penting. Ialah faktor makro sosial dan mikro individual. Makro sosial mengacu pada budaya, ekonomi, demografi penduduk, politik, nilai-nilai kelembagaan, lingkungan fisik, kelas sosial, kasta, dan ras. Sedangkan mikro

individual meliputi interaksi interpersonal, percakapan, media, dan interaksi rutin. Dari faktor-faktor tersebut akan terlihat bagaimana gejala-gejala hingga *fashion jilboobs* berkembang dan menjadi *life style* di masyarakat.

1. Faktor Makro Sosial

Globalisasi saat ini menimbulkan dampak kehancuran moral global. Seluruh dunia termasuk negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim terkena degradasi moral ini. Munculnya globalisasi ini tak lepas dari peran media-media sekuler. Media sekuler telah berhasil mendongkrak popularitas wanita menjadi sosok yang diperhitungkan di kancah pergulatan dunia modern. Media itu tak hentinya menghadirkan wanita hemat busana untuk mendongkrak tiras medianya. Wanita-wanita cantik diburu dan ‘disiksa’ di ruang redaksi, ditempatkan di kolom-kolom media yang sempit tanpa ‘selimut’ busana yang memadai.¹

Fenomena *jilboobs* memang berkembang paralel dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung cepat yang digerakan proses globalisasi dan modernisasi. Pergesaran bentuk rasionalitas yang terjadi akibat modernisasi dipahami sebagai katup yang membuka berbagai kemungkinan sosial, ekonomi, dan kultural, tapi sekaligus menimbulkan banyak permasalahan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan. Masalah ini terutama berkaitan dengan proses sekularisasi

¹ Abu Al-Ghifari, *Wanita Bukan Makhluk Penggoda* (Bandung: Mujahid Press, 2005), hlm. 22.

yang terjadi ketika agama, baik sebagai kelembagaan, organisasi, basis tindakan maupun kesadaran, mulai terkikis atau dalam beberapa kasus tersingkir dari dinamika kehidupan masyarakat. Bagi Bryan Wilson, sekalipun sekularisasi tidak otomatis bermakna orang meninggalkan agama dalam kehidupan sehari-hari, ia memiliki konsekuensi serius terhadap fenomena keagamaan karena agama tidak lagi signifikan dalam cara kerja sistem sosial masyarakat.² Faktor makro sosial di sini meliputi pendidikan dan masyarakat industri, *adult transition*, dan media masa.

a. Pendidikan dan Masyarakat Industri

Agama kehilangan signifikansi sosial untuk mempengaruhi tingkah laku kehidupan manusia. Ia berhenti memainkan peran utamanya baik dalam memelihara tatanan sosial maupun sebagai sumber pengetahuan sosial. Suatu yang kerap dihubungkan hal tersebut adalah fenomena pendidikan massal, suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dengan ekspansi kapitalisme. Ernest Gellner menyatakan bahwa ketika ekspansi industrialisme mengambil tempat, kebutuhan masyarakat terpelajar yang gesit dan berbicara dalam bahasa yang umum serta memegang nilai-nilai budaya yang sama menjadi meningkat. Dalam

² Bryan Wilson, *Religion in Sociological Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1982), hlm. 47-48.

konteks ini, rasionalitas, dalam pengertian koherensi dan efisiensi, merupakan unsur yang paling penting dalam perubahan masyarakat.³

Sebagai konsekuensinya, ada kebutuhan mendesak terhadap idiom yang tunggal untuk memenuhi kebutuhan industri pembagian kerja. Pada gilirannya, pembagian kerja menuntut pemahaman bersama. Untuk memenuhi tuntutan itu, satu pola pendidikan seragam harus diadakan dengan idiom yang lebih universal. Ini dapat dipenuhi melalui sistem pendidikan universal yang telah distandarkan. Tuntutan untuk melakukan standarisasi sistem pendidikan secara tak terelakan berimplikasi pada tingginya penyebaran kebudayaan homogen. Dengan kata lain, masyarakat industri modern tergantung pada inovasi, mobilitas pekerjaan, aturan penulisan universal, dan sistem pendidikan yang menanamkan standarisasi kebudayaan tinggi.⁴

Gellner menyadari pengaruh modernisasi pada agama secara umum, dalam istilah homogenisasi kebudayaan melalui sistem pendidikan yang dikontrol oleh negara. Menurutnya kemunduran keyakinan terhadap agama dan pelaksanaannya adalah konsekuensi yang sudah sewajarnya dari pertumbuhan masyarakat industri-pengetahuan (*scientific-industrial*), yang dibawa oleh fenomena keseragaman pendidikan massal. Wibawa

³ Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Oxford: Blacwell, 1983), hal ini juga pernah disampaikan dalam perkuliahan Antropologi Politik yang penulis ikuti.

⁴ *Ibid.*

keyakinan agama (dalam hal ini mengenai jilbab) memudar begitu wibawa ilmu pengetahuan semakin bersinar.⁵

b. *Adult Transition*

Faktor masyarakat industri di atas sangat signifikan bila kita kaitkan dengan munculnya tren mode *jilboobs* di masyarakat. Kaum muda (*Jilboobers*) adalah mereka yang berusia antara 15 hingga 29 tahun, merupakan masa transisi dalam pencarian identitas (*adult transition*). kaum muda pada usia tersebut rentan mengalami kegalauan. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa kaum muda mempunyai sumber daya, pengalaman, dan peluang yang berbeda-beda sebagai akibat perbedaan kelas dan status. Karena banyaknya beban yang dihadapi kaum muda, mereka tampaknya tumbuh menjadi sektor masyarakat yang paling rentan mengalami persoalan-persoalan sosial dan psikologis. Kerap kali mereka bahkan merasa ambigu dan harus menerima kenyataan sebagai pecundang globalisasi (*losers of globalization*), yang mengalami krisis identitas, atau tepatnya pergeseran identitas.⁶

Ambiguitas dan identitas yang tengah bergeser menyebabkan kaum muda terdorong untuk mengembangkan respons-respons tertentu tipikal generasi muda. Respon ditandai dengan kegalauan, gerak jiwa,

⁵ *Ibid.*

⁶ Noorhaidi Hasan, "Violent Activism, Islamist Ideology, and the Conquest of Public Space among Youth in Indonesia", dalam jurnal *al-Jami'ah*, hlm. 3-5. Artikel ini juga pernah disampaikan Beliau dalam materi perkuliahan *Antropologi Politik* yang penulis ikuti.

passion, optimisme, rasa frustrasi, dan tak berdaya sekaligus melahirkan identitas budaya kaum muda (*cultural identity of youth*). Tren mode *jilboobs* merupakan salah satu respon mereka dalam masa transisi tersebut. Tren *jilboobs* muncul akibat kaum muda merasa terperas oleh dominasi arus besar pemahaman jilbab syar'i baik oleh institusi agama, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya.

c. Media and Entertainment

Seperti dijelaskan di atas, kaitannya dengan fenomena *jilboobs* ternyata media dan hiburan di televisi menjadi faktor yang sangat krusial dalam mempengaruhi pola perilaku anak muda. Kita ketahui bersama bahwa masa transisi ialah masa dimana seseorang mudah meniru apa yang mereka anggap menarik dari yang mereka saksikan. *Jilboobs* muncul dari pertemuan antara tampil cantik dan menarik secara fisik, dengan tuntutan kesalihan berjilbab yang mereka yakini. Tampil menarik secara fisik bisa dengan mudah mereka jumpai dalam sinetron-sinetron, iklan-iklan kosmetik, dan hiburan lainnya yang ada dalam siaran televisi. Televisi merupakan media yang paling efektif untuk menyebarkan informasi hingga pelosok-pelosok desa. Mereka dapat dengan mudah meniru pakaian artis yang mereka kagumi lalu memodifikasinya sedemikian rupa agar tetap menampilkan simbol agama.

Tidak hanya itu, wanita memiliki daya tarik yang tak hentinya menjadi incaran berbagai kepentingan. Dunia ekonomi telah banyak

diuntungkan dengan menempatkan wanita sebagai umpan dan sasaran bagi produknya. Wanita-wanita itu menjadi model untuk produk-produk itu. Namun yang menjadi perhatian bukan pribadi wanita itu melainkan kemolekan tubuh dan kecantikan wajahnya. Wanita dijadikan alat pemancing agar orang melirik produknya. Diharapkan dengan melihat model artis produk tersebut wanita lain dan masyarakat pada umumnya tertarik untuk mencobanya.⁷ Gejala ini disebut oleh Karl Marx sebagai fetisisme komoditi yang berujung pada kesadaran palsu (*false consciousness*).⁸

2. Faktor Mikro Individual

Memahami matriks persinggungan antara faktor modernisasi dan identitas agama yang berada di belakang berkembangnya mode *jilboobs* memungkinkan kita untuk mencari penjelasan yang lebih tepat dan komprehensif atas meningkatnya tingkat kerentanan kaum muda terhadap *fashion* pacandu gaya hidup urban. Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian faktor makro sosial, ternyata hal tersebut juga ada kaitannya dengan tingkat ekonomi, pendidikan, dan media massa yang menciptakan selera yang homogen di masyarakat. Agama telah kehilangan signifikansinya terhadap model jilbab syar'i yang diwajibkan. Faktor psikologislah yang kemudian lebih diperhitungkan, *Jilboobers* berusaha

⁷ Abu Al-Ghifari, *Wanita.*, hlm. 16-17.

⁸ Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika.*, hlm. 291-294.

menegosiasikan antara syari'ah dan gaya hidup yang diimpor oleh globalisasi.

Makna jilbab telah bergeser, yang tadinya terkesan dogmatis kini dipolitisasi dengan alasan psikologis. Perempuan yang berjilbab atas motif ini sudah tidak memandang lagi jilbab sebagai kewajiban agama, namun sebagai budaya dan kebiasaan yang bila ditinggalkan akan membuat suasana hati tidak tenang. Berdasarkan motif kenyamanan psikologis tersebut, bentuk jilbab yang dikenakan disesuaikan dengan konteks dan fungsinya. Sehingga melahirkan identitas baru di dunia jilbab indonesia, yaitu *jilboobs*.

Faktor interaksi rutin antar sesama kawan dengan rentan umur yang relatif sama kemudian semakin memperburuk keadaan. Karena berada dalam satu fase yang sama, antar mereka berusaha untuk tampil menarik di depan lawan jenisnya. Sehingga antar satu dan yang lainnya tidak mau kalah. Lalu mereka mencari informasi berupa *fashion* dan kosmetik yang sekiranya dapat menarik perhatian laki-laki, namun masih tetap mempertahankan jilbab mereka sebagai simbol kesalehan. Tubuh mereka merupakan aset paling mewah yang dapat menarik perhatian laki-laki, sehingga mereka berupaya untuk menampakkannya namun tetap memperthankan jilbab sebagai identitas agama.

Tren *jilboobs* muncul dari pesilangan antara globalisasi, modernisasi, dan gaya hidup wanita. Berger dan Huntington mendefinisikan empat proses budaya yang terjadi secara simultan dalam globalisasi; budaya

bisnis internasional, budaya intelektual dunia, budaya pop global dan budaya keagamaan populer. Persinggungan antara kekuatan-kekuatan globalisasi dan budaya lokal menyebabkan sejumlah konsekuensi, di antaranya penggantian budaya lokal dengan budaya global, koeksistensi budaya lokal dan global, sintesis budaya global dengan budaya lokal, dan resistensi budaya lokal terhadap budaya global.⁹

Tren *jilboobs* penulis yakini masuk dalam identifikasi di atas, yaitu budaya pop global dan keagamaan populer. Wanita adalah komoditi ekonomi yang pangsa pasarnya tidak pernah mati. Sehingga para produsen terus berinovasi guna menjaga pangsa pasar mereka. Jilbab dalam perkembangannya juga telah masuk dalam komoditi yang digilai wanita muslimah, karena ia merupakan simbolisasi identitas diri, kelas sosial, tingkat ekonomi, dan juga status sosial di masyarakat. Faktor-faktor di atas yang penulis yakini paling relevan dengan tumbuh dan berkembangnya fashion *jilboobs* di masyarakat.

B. Negosiasi Antara *Life Style* dan Syari'ah

Melihat konteks transisional yang melatari munculnya mode *jilboobs* pada remaja muslimah di Indonesia, penulis meyakini ada persinggungan yang kuat antara *life style* dengan budaya keagamaan di Indonesia. Kita dapat melihat keharmonisannya dalam acara-acara keagamaan yang disiarkan oleh

⁹ Peter L. Berger dan Samuel Huntington, eds., "Many Globalizations Cultural Diversity in the Contemporary World." Dalam Noorhaidi Hasan, *Islam.*, hlm. 104.

beberapa media di Indonesia. Ulama dan agama seolah telah masuk dalam komoditi modernisasi, eksistensi keduanya bukan lagi sekedar sebagai pemberi nasihat agama. Pengajian-pengajian yang rutin kita saksikan di layar televisi misalnya, menggambarkan bagaimana pakaian ustad dan audiensnya sangat *fashionable*. Tak jarang kadang seorang ustad mengenakannya karena alasan *branding* atau produk sponsor yang turut mempersembahkan acara keagamaan tersebut.

Memahami revitalisasi agama di dunia modern, Jose Casanova menentang asumsi bahwa agama akan cenderung menghilang dengan perkembangan modernisasi. Dia berpendapat bahwa agama mengalami proses deprivatisasi dan repolitisasi, ia meninggalkan ranah privat dan memasuki ranah publik guna mengambil bagian dalam ajang kontestasi, wacana legitimasi, dan menggambar ulang batas-batas agama di masyarakat.¹⁰ Dalam dunia modern saat ini, ulama juga mengalami modernisasi (*new ulama*), yaitu mereka yang berdakwah atas peran media yang melihat bakat mereka. Bahkan tak jarang ada kontestasi pencarian bakat ulama yang dipersembahkan oleh media. Sasaran utama ulama modern (*new ulama*) adalah masyarakat kota yang begitu akrab dengan dunia modern. Pengajian-pengajiannya didesain sedemikian rupa sehingga berkembang menjadi *life style* di kalangan

¹⁰ Jose Casanova, "Public Religions in the Modern World" dalam Noorhaidi Hasan, "Piety, Politics, and Post-Islamism: *Dhikr Akbar* in Indonesia, Dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, vol. 50, No. 2, 2012, hlm. 373.

masyarakat kota dan tak jarang kumpulan pengajian tersebut memiliki identitas tersendiri, semisal seragam pengajiannya.¹¹

Representasi agama dalam masyarakat modern dapat dipahami bahwa agama sejalan atau kompatibel dengan dengan dunia modern. Ulama bukan hanya sekedar pemberi fatwa dan nasihat agama, dalam perkembangannya mereka juga banyak yang terjun dalam dunia bisnis yang erat hubungannya dengan tantangan globalisasi dan modernisasi. Hal tersebut justru membuat persepsi mengenai agama seolah lahir dari konstelasi sosial itu sendiri. Lintasan-lintasan eksternal perilaku keagamaan sangat beragam sampai-sampai pemahaman tentang perilaku ini hanya bisa diraih dari sudut pandang pengalaman-pengalaman subyektif, ide-ide, dan tujuan-tujuan yang diinginkan individu ringkasnya, dari sudut pandang 'makna' (*sinn*) perilaku religius itu sendiri.¹²

Penjelasan mengenai peran agama dalam dunia modern di atas seolah menggambarkan bahwa syari'ah dan *life style* memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Begitu juga dengan tren mode *jilboobs* yang berkembang di masyarakat. Remaja muslimah menemukan bentuk pakaian yang sejalan dengan perkembangan dunia *fashion* modern. Signifikansi agama mengenai kesederhanaan, kesopanan, dan azab hukuman masih bisa dinegosiasikan dengan perkembangan dunia *fashion* modern. Politisasi dogma mengenai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 375-380.

¹² Max Weber, *The Sociology of Religion*, alih bahasa Yudi santoso (yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 97.

jilbab syar'i mencapai titik temu bila dihubungkan dengan globalisasi dan modernisasi, yaitu tren mode *jilboobs*. Pandangan demikian mengingatkan kita pada pandangan Abdul Karim Soroush yang memisahkan antara agama (*religion*) dan pengetahuan agama (*religious knowledge*). Kalau agama adalah kebenarannya tidak bisa diganggu gugat, sedangkan pengetahuan akan agama adalah bentuk penafsiran seseorang terhadap agama tersebut, yang kebenarannya sangat relatif dan bisa diperdebatkan.¹³

Jilboobers yakin bahwa bentuk atau model pakaian yang mereka kenakan tidak melanggar syari'at. Adapun mengenai standarisasi jilbab syar'i yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan Qur'an surat an-Nisa (59), merupakan kajian berbeda yang tidak mempertimbangkan faktor makro sosial dan mikro individual yang penulis sebutkan di atas. Menurut mereka tidak ada korelasi antara model jilbab yang mereka kenakan dengan kesalihan agama. Sehingga fatwa haram MUI dinilai keliru jika mengkaitkan antara model pakaian mereka dengan pelecehan seksual. Mereka menilai sesungguhnya perintah mengenai menjaga kehormatan (kemaluan) secara hirarkis normatif sudah jelas, yaitu laki-laki terlebih dahulu yang di perintahkan sesuai dengan Qur'an an-Nur (31) lalu wanita pada ayat berikutnya (32).¹⁴

¹³ Abdul Karim Soroush, "Reason and Democracy in Islam." dalam Asma Barlas, *Believing Woman in Islam*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 12.

¹⁴ An-Nur (24): 31-32.

Jilboobers merasa pakaian yang mereka kenakan bukan paksaan dari pihak mana pun, semisal aturan universitas, perintah orang tua, atau paksaan lingkungan sosial mereka. Rasa nyaman mengalahkan *stereotype* terhadap model pakaian mereka. Mobilitas mereka di ruang publik dirasakan lebih luas jaringannya tanpa harus memikirkan simbol dan identitas agama yang mereka kenakan, berbeda dengan model jilbab tertutup dan cadar yang mereka nilai mobilitasnya terbatas. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor usia mereka yang masuk dalam kategori masa transisi, mereka menganggap banyak yang harus ‘dicoba dan dilakukan’ di usia muda guna bekal pengalaman ketika sudah tua dan dewasa.

Jilboobers tidak ingin dijadikan pihak yang paling bersalah dengan model pakaian tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika hendak menjustifikasi sebuah realita yang berkembang di masyarakat. *Jilboobers* menyadari perlu adanya pandangan hukum yang progresif guna menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi. Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan seharusnya juga dapat mempertimbangkan konteks yang sedang berkembang di masyarakat. *Jilboobers* meyakini islam yang humanis ialah yang bisa mengharmonisasikan teks dan konteks hukum.

C. Makna Politis dibalik *Fashion Jilboobs*

Jilbab masuk pada arena kontestasi permainan makna dan tafsir. Apakah ia simbol kesalehan, ekspresi perlawanan (resistensi), penguatan identitas, persembunyian simbolik, tren *fashion* pecandu gaya hidup urban (*urban life style*), atau kombinasi dari dua atau tiga hal itu atau malah di luar itu semua.¹⁵ Bagaimana wanita muslimah mengklaim posisi berupa tren *jilboobs* syarat akan makna politik, baik politik dalam arti luas dan juga sederhana. Jika diruntut kembali hangatnya perbincangan soal *jilboobs* ialah ketika MUI memfatwa haram cara atau model berpakaian mereka. lalu hal tersebut dibenturkan oleh paham demokrasi mengenai kebebasan berekspresi. MUI dinilai terlalu totaliter terhadap wanita, hingga model berpakaianpun diatur sedemikian rupa. Proses penjustifikasian haram seharusnya melalui tahapan dan pertimbangan yang panjang, bukan sekedar menjalankan perintah teks agama.

Memang tidak ada aksi nyata mengenai perlawanan fatwa haram *jilboobs* oleh kalangan wanita. Hal tersebut karena *fashion jilboobs* tidak memiliki basis masa yang jelas, tidak terorganisir atau tidak ada kelompok resmi yang mengatasnamakan *jilboobs*. Protes-protes mengenai fatwa haram tersebut banyak diperbincangkan di dunia virtual (*facebook* dan *twiter*) dan

¹⁵ Joko Wahyono, "HAM dan Daulat Jilbab Polwan", dalam Kolom Opini Koran *Suara Karya* (Yogyakarta, 2013), hlm. 9.

media masa.¹⁶ Bentuk resistensi di sini lebih kepada sikap mereka yang tidak mau ambil pusing terhadap fatwa tersebut. Mereka menilai MUI mendasarkan fatwanya hanya berdasarkan teks dan melupakan konteks kekinian, yaitu berjilbab bukan sekedar urusan agama. urusan jilbab ialah urusan yang multi dimensi mencakup faktor internal pengguna dan eksternal semisal kewajiban institusi, aturan negara, dan pengaruh lingkungan sekitar.

Jilboobers tidak lantas mengganti model pakaian mereka sesuai dengan apa yang difatwakan MUI. *Jilboobers* merasa model jilbab yang dikenakan sudah memenuhi perintah agama untuk berjilbab. Urusan berjilbab adalah urusan yang rumit, banyak faktor yang mempengaruhi wanita mengenkannya dan sudah dijelaskan pada bab-bab sebelum ini. Proses tawar-menawar atau negosiasi antara kebutuhan psikis dan tantangan modernisasi menjadi faktor yang sangat krusial. Wanita merupakan makhluk yang begitu akrab dengan dunia mode dan *fashion*. Berjilbab bukan sekedar ingin menyampaikan identitas agama apalagi sekedar persembunyian simbolik. Sehingga bagi mereka membentuk identitas baru yang dihasilkan oleh negosiasi di atas sangat menentukan mobilitas dan posisinya dalam relasi sosial.

¹⁶ Dwi Andi Susanto, "Banyak Pro-Kontra Setelah MUI Fatwa Haram Jilboobs", dalam media kabar online, *Merdeka.com*. <http://www.merdeka.com/teknologi/banyak-pro-dan-kontra-setelah-mui-fatwa-haram-jilboobs.html>. diakses pada, 26 maret 2015.

Menurut Horton dan Hunt (1987), ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat mobilitas pada masyarakat modern, yaitu faktor struktural dan individu. faktor struktural ialah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Sedangkan faktor individual ialah kualitas, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, keterampilan pribadi, dan sebagainya.¹⁷ *Jilboobers* menilai peluang dan mobilitasnya sangat tergantung dengan apa yang mereka kenakan sebagai pakaian. *Jilboobs* juga sering disebut sebagai jilbab modis atau jilbab *hang out*, yaitu model jilbab yang fleksibel terhadap ruang dan waktu. Mereka menilai bentuk jilbab yang mereka kenakan merupakan jawaban dari psikologis mereka sendiri, sekaligus jawaban dari tantangan globalisasi dan modernisasi yang menuntut mobilitas tinggi dalam relasi sosial.

Jilboobs merupakan tren mode yang lahir dari cara wanita muslimah mensiasati tantangan globalisasi, fatwa MUI, dan *passion* pribadi. *Jilboobs* merupakan jawaban yang paling pas bagi mereka yang merasa sebagai wanita progresif terhadap tantangan modernisasi. Sehingga *stereotype* atau anggapan ‘miring’ mengenai korelasi pakaian dan kasalihan mereka tidak bisa dilabeli secara mudah. Seperti yang diungkap Max weber di atas, pemahaman tentang perilaku ini hanya bisa diraih dari sudut pandang pengalaman-pengalaman subyektif, dari sudut pandang ‘makna’ (*sinn*) perilaku religius itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Syahrial Syarbaini, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 66.

¹⁸ Max Weber, *The Sociology*, hlm. 97.

D. Politik Identitas *Jilboobers*

Tren mode *jilboobs* hadir sebagai salah satu solusi bagi mereka yang galau ketika dihadapkan dengan tantangan globalisasi, fatwa MUI, dan juga *passion*. Melalui arus mode dan *fashion* modern, *Jilboobers* memperkenalkan pandangan baru tentang aturan agama mengenai jilbab yang tidak konservatif dan menerima modernisasi sebagai suatu kenyataan. Kebutuhan akan tren jilbab yang *fashionable* semakin meningkat bersamaan dengan perkembangan pesat globalisasi. Sehingga melahirkan *trade mark* tersendiri yang penulis anggap sebagai politik identitas¹⁹ *Jilboobers*.

Politik identitas menyuarakan ketidakpuasan dan kekecewan masyarakat, terutama kaum muda. Secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum yang terpinggirkan’ dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat.²⁰ Pengungkapan persaan tidak puas dan kecewa itu terutama berlangsung dalam kegiatan dan aktivitasnya dalam relasi sosial. Identitas diri di sini merujuk pada kalangan muslim yang menerima gagasan-gagasan

¹⁹ politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan etnisitas yang memiliki *trade mark* (merek dagang) yang diperjuangkan dalam relasi sosialnya, kemudia eksklusivitas tak terhindarkan. Lihat Thomas Hylland Eriksen “*Ethnic Identity*”, hlm. 43-63.

²⁰ Cressida Heyes. *Identity politics*. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy <<http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/>>.

modernisme islam.²¹ Mengarah pada penerimaan dan apresiasi terhadap khazanah kebudayaan barat, dan pada saat yang sama melakukan pemurnian atas paham keagamaan dengan mengembalikannya pada doktrin awal al-Qur'an dan Sunnah.²²

Bisa disimpulkan, *jilboobs* merupakan refleksi atas usaha pencarian alternatif bentuk jilbab yang sesuai dengan tantangan globalisasi. Daya tarik *Jilboobs* terletak dalam kemampuannya mensiasati atau menegosiasikan antara *life style* dan syari'ah. Ia muncul sebagai simbolisasi keterbukaan antara islam dan kenyataan globalisasi. Eriksen mencatat politik identitas sebagai bentuk etnisitas yang cenderung membangun *stereotype-stereotype* dan menarik garis batas sosial dari etnisitas yang lainnya. Eriksen menekankan bahwa etnisitas muncul ketika “perbedaan-perbedaan kultural yang dipersepsikan akan berakibat pada perbedaan sosial” (*ethnicity occurs when perceived cultural differences make a sosial difference*). Etnisitas muncul karena adanya interaksi dari kumpulan-kumpulan yang merasa “berbeda”, ketika pembedaan “kita” dan “mereka” menjadi penting.²³

Perbedaan-perbedaan ini yang kemudian dirasakan oleh *Jilboobs*, model jilbab yang mereka kenakan dinilai oleh sebagian kalangan tidak syar'i dan rentan pelecehan seksual. Mode *jilboobs* terlalu diniali sederhana oleh

²¹ Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, *Islam.*, , hlm. 13

²² Deliar Noer, *Gerakan.*, hlm. 8.

²³Thomas Hylland Eriksen “*Ethnic Identity, National Identity and Intergroup Conflict: The Significance of Personal Experiences*” (In R. Ashmore et al., eds., *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*, 2001) Oxford: Oxford University Press, hlm. 43-63.

mereka yang konservatif-normatif, walau kenyataannya mereka yang kontra secara tidak langsung juga menikmati estetika *jilboobs* tersebut. Usaha untuk menerapkan dengan ketat pola hidup yang kaku, eksklusif, berdasarkan keimananan, justru akan menimbulkan reaksi sebaliknya. Mereka yakin bahwa islam yang humanis adalah yang bisa menerima globalisasi dan modernisasi sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi, bukan sebaliknya hidup dalam tembok moralitas berdasarkan nilai-nilai prilaku yang khas. Misalnya, sebagai ganti baju gaya barat atau kaos yang trendi, mereka harus mengenakan jubah atau cadar.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan beberapa saran mengenai probelematika yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Istilah *jilboobs* merupakan gabungan dua kata, yaitu *Jil* (jilbab) dan *boobs* (payudara). Istilah tersebut digunakan merujuk kepada wanita muslim yang mengenakan jilbab tapi pada saat yang sama mengenakan pakaian yang menonjolkan lekuk tubuh mereka, khususnya payudara. Fenomena *jilboobs* ramai dibicarakan setelah MUI memberikan fatwa haram terhadap model pakaian mereka. Hal ini sempat menjadi *trending* topik di beberapa stasiun televisi di Indonesia, banyak pro-kontra setelah MUI memfatwa haram *jilboobs*. MUI mendasarkan keharaman tersebut berdasarkan fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi. Tren *jilboobs* dinilai keliru dan rentan terhadap pelecehan seksual, wanita muslim dinilai berusaha memvisualisasikan bentuk tubuh mereka yang akhirnya akan mengundang nafsu laki-laki untuk berbuat tidak sopan.

Hingga saat ini institusi agama dan mayoritas masyarakat terlalu memandang sederhana, reduksionis, dan hitam-putih urusan seksualitas

(khususnya tentang Jilbab dan pemahamannya yang berkembang di masyarakat). Faktor makro sosial dan mikro individual tidak diperhitungkan dalam menjustifikasi fenomena *jilboobs* yang dianggap sebagai model jilbab yang keliru. Sedangkan pemahaman *Jilboobers* akan jilbab juga relatif sama dengan wanita muslim pada umumnya, yaitu jilbab sebagai penutup aurat, identitas diri, *self defence*, dan *fashion*. Pemahaman tentang perilaku ini hanya bisa diraih dari sudut pandang pengalaman-pengalaman subyektif (antropologis), ide-ide, dan tujuan-tujuan yang diinginkan individu ringkasnya dari sudut pandang 'makna' (*sinn*) perilaku religius (*Jilboobers*) itu sendiri.

Tren *jilboobs* berkembang seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan modernisasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari arus pergerakan orang, barang, pemikiran, gagasan seni, budaya, bahasa, fashion dan lainnya berlangsung begitu dinamis tanpa bisa dihalangi dan dibendung oleh batas-batas politik negara-bangsa. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan memiliki populasi terbesar ke-4 dunia. Salah satu ciri negara yang tengah berkembang adalah banyaknya investor yang menginvestasikan dananya guna membangun industri dalam skala nasional, guna menumbuhkan laju ekonomi negara tersebut. Masyarakat pada tahap ini mengalami pergeseran sumber daya. Ernest Gellner menyebutnya masyarakat industri. Masyarakat industri hidup dalam suasana ekspansi kapitalisme, mereka dituntut memiliki daya saing dalam bekerja. Hal tersebut hanya dapat tercapai jika kebutuhan pendidikan terpenuhi oleh negara. Negara dituntut untuk melakukan standarisasi pendidikan guna

mencetak manusia-manusia yang bersumberdaya tinggi dan universal (homogen). Dengan kata lain, masyarakat industri modern tergantung pada inovasi, mobilitas pekerjaan, aturan penulisan universal, dan sistem pendidikan yang menanamkan standarisasi kebudayaan tinggi.

Ernest Gellner juga menyebut masyarakat pada fenomena di atas sebagai masyarakat rasional. Gellner menyadari pengaruh modernisasi pada agama secara umum, dalam istilah homogenisasi kebudayaan melalui sistem pendidikan yang dikontrol oleh negara. Menurutnya kemunduran keyakinan terhadap agama dan pelaksanaannya adalah konsekuensi yang sudah sewajarnya dari pertumbuhan masyarakat industri-pengetahuan (*scientific-industrial*), yang dibawa oleh fenomena keseragaman pendidikan massal. Wibawa keyakinan agama (dalam hal ini mengenai jilbab) memudar begitu wibawa ilmu pengetahuan semakin bersinar.

Jilbab dalam konstelasi masyarakat industri bukan lagi sekedar simbolisasi kewajiban agama, melainkan sebagai suatu *fashion* dan *life style*. Jilbab dapat menjelaskan posisi dan status seseorang dalam kehidupannya bermasyarakat. Tren mode *jilboobs* hadir di persimpangan antara *fashion*, *life style*, dan syari'ah. Ia merupakan bentuk negosiasi dari ketiganya. Remaja muslimah ingin terlihat *fashionable*, atraktif, sekaligus saleh dalam relasinya di masyarakat, walau dalam kenyataannya model jilbab mereka mendapat kritik keras dari ulama MUI. *Jilboobs* memiliki makna politis yang sangat khas, yaitu bentuk resistensi pemahaman jilbab yang konservatif dan kental akan nuansa

politik pengistimewaan *gender* tertentu (patriarkis). Jilbab bukan lagi perpanjangan tangan kaum laki-laki guna memenjara kebebasan ekspresi mereka. Mereka menganggap Islam yang humanis ialah yang mampu menerima modernisasi sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi.

Pandangan mereka mengenai jilbab syar'i adalah model jilbab tertutup seperti jubah yang hanya menampilkan telapak tangan dan wajah. Meski demikian, model pakaian *jilboobs* yang mereka kenakan tidak ingin dicap tidak syar'i. Mereka beranggapan berjilbab memang perintah agama yang sudah jelas, tapi urusan mengenai bentuk atau model jilbab yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai konteks kekinian. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Karim Soroush yang memisahkan antara agama (*religion*) dan pengetahuan agama (*religious knowledge*). Kalau agama adalah kebenarannya tidak bisa diganggu gugat, sedangkan pengetahuan akan agama adalah bentuk penafsiran seseorang terhadap agama tersebut, yang kebenarannya sangat relatif dan bisa diperdebatkan. *Jilboobers* juga meyakini tidak ada korelasi yang pasti antara bentuk jilbab yang dikenakan dengan perilaku, sopan santun, dan moralitas yang baik.

Jilboobers yang menjadi sorotan fatwa haram MUI adalah mereka yang berusia 15 sampai 30 tahun, karena pada usia tersebut mereka secara fisik masih terlihat menarik dan cantik. Usia ini merupakan usia produktif, dimana mobilitas wanita muslim menjadi penentu masa depan mereka. kebutuhan akan pengetahuan dan pengalaman bergantung pada masa muda yang dimanfaatkan

seefektif dan semaksimal mungkin. *Jilboobers* meyakini jika model jilbab yang mereka kenakan memiliki daya jelajah yang lebih dibanding dengan mereka yang berjilbab tertutup atau berjubah. Sehingga mereka merasa fashion *jilboobs* merupakan jawaban yang pas terhadap tantangan modernisasi dan juga masa tua. Hal tersebut yang kemudian secara tidak langsung menjadi politik identitas *Jilboobers*, ada nilai dan simbol agama yang diperthankan sekaligus menerima tantangan modernisasi. Walau secara psikologis sebagian mereka merasa terdiskriminasi atas *stereotype-stereotype* pemahaman konvensional mengenai jilbab.

B. Saran

Permasalahan mengenai jilbab seharusnya bukan lagi permasalahan mengenai dominasi *gender* tertentu. Negara tidak dibangun berdasarkan superioritas dan hegemoni kaum laki-laki terhadap perempuan. Persoalan *jilboobs* seharusnya dilihat dari sisi egalitarian-demokratis bukan dogmatis-konservatif, artinya permasalahan tersebut lahir dari pertemuan antara paham demokrasi dan agama yang saling berkaitan. *Stereotype* mengenai *jilboobs* tidak akan pernah berhasil mengubah watak kaum muda yang selalu ingin terlihat atraktif. Hal yang kemudian diperlukan adalah bagaimana kita mendesain ulang model pakaian muslimah agar terlihat syar'i sekaligus *fashionable*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV.Darus Sunnah, 2002.

B. Fikih/Hukum Islam/Islam

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Muhyidin, Muhammad, *Membelah Lautan Jilbab*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008.

Munawir, Warson, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Partic, Li, *Jilbab Bukan Jilboobs: 101 Cara Berjilbab Sempurna*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014.

Yafie, K.H Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

C. Hukum, Sosial, dan Politik

Al-Ghifari, Abu, *Wanita Bukan Makhluq Penggoda*, Bandung: Mujahid Press, 2005.

Barlas, Asma, *Believing Woman in Islam*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Bungin, H. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Eviandaru, Monika, *Perempuan Post-Kolonial dan Identitas Komoditi Global*, Yogyakarta: Obor, 2001.

Foucault, Michel, *History of Sexuality*, alih bahasa Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan FIB Universitas Indonesia dan Forum Jakarta-Paris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Gellner, Ernest, *Nations and Nationalism*, Oxford: Blacwell, 1983.

Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory*, (terj.) Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2013.

- Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: INSISTPress, 2007.
- Koentjara Ningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Aksara Baru, 1980.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern dalam Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontempore: Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Piliang, Yasraf Amir, *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Akasara Baru, 2003.
- Prasetyo, Hendro, *Islam & civil Society: Pandangan Mulim Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2002.
- Qolwun, A. Awy, *Dari Jilboobs Hingga Nikah Beda Agama*, Jakarta: Mizania, 2015.
- Saifudin, Ahmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet.ke-4, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012.
- Suseno, Franz Magnis, *filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Syahrial Syarbaini, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
- Ubed, Abdilah, *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Vaezi, Ahmed, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006.
- Weber, Max, *The Sociology of Religion*, alih bahasa Yudi santoso (yogyakarta: IRCiSoD, 2012).
- Wilson, Bryan, *Religion in Sociological Perspective*, oxford: Oxford University Press, 1982.

D. Jurnal

- Antoun, Richard, On the Modesty of Women in Arab Muslim Villages, dalam *Jurnal American Anthropologist* 70, no. 4, 1968.
- Brenner, Suzanne Brenner, Recontrucsing Self and Society: Javanese Muslim Women and The Veil, dalam *Journal of The American Ethnological Society*, University of Calivornia, 1996.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, *Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century*, Jepang: Kyoto University Press, 2012.
- Eriksen, Thomas Hylland, *Ethnic Identity, National Identity and Intergroup Conflict: The Significance of Personal Experiences*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Hasan, Noorhaidi, Violent Activism, Islamist Ideology, and the Conquest of Public Space among Youth in Indonesia, dalam jurnal *al-Jami'ah*.
- Hasan, Noorhaidi, Piety, Poltics, and Post-Islamism: *Dhikr Akbar* in Indonesia, dalam Jurnal *Al-Jami'ah*, vol. 50, No. 2, 2012.
- Macleod, Arlene Elowe, Hegemonic Relations and Gender Resistance: The New Veiling as Accommodating Protest in Cairo, dalam *Chicago Journals*, Vol. 17, No. 3, Spring, 1992.
- Mahmood, Saba, *Poltics of Piety*, New Jersey: Princeton University Press, 2004.
- Sriharini, Jilbab dan Kiprah Perempuan dalam Sektor Publik, dalam Jurnal *PMI*, Vol. VI. No. 1, September, 2008.
- Wikan, Unni, *Behind the Veil in Arabia*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.

E. Skripsi/Thesis/Research

- Duwal, Qoidud, *Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*, Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

F. Makalah

- Salim, Darby Jusbar, *Busana Muslim dan permasalahannya*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I, 1984.

G. Perundang-undangan

Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

H. Koran dan Majalah

Abdalla, Ulil Abshar, Islamisasi Ruang Publk, dalam Kolom Opini *Jaringan Islam Liberal (JIL)*, 6 Februari 2012.

Abshar, Ulil, Syari'at Islam di Jalur Lambat, dalam Majalah *Tempo*, No. 11/XXXV/ edisi 8-14, 2006.

Hidayat, Pangki T, Jilboobs dan Simbol Otokratik, dalam Kolom Opini Koran *Jawa Pos*, 12 Agustus 2014.

Sururin, Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur'an, dalam Majalah *AULA*, No. 04/Th.XXII, April 2000

Suryakusuma, Julia, Jilboobs: A Storm in a D-cup, dalam kolom opini koran *Jakarta Post*, 20 agustus 2014

Wahyono, Joko, HAM dan Daulat Jilbab Polwan, dalam Kolom Opini Koran *Suara Karya* Yogyakarta, 2013.

I. Wawancara

Wawancara bersama Fhaviola Model dan Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, pada 26 maret 2015.

Wawancara bersama Diana Kartika Sari Model dan Mahasiswi Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, pada 27 maret 2015.

Wawancara bersama Khoirani Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, pada 27 maret 2015.

Wawancara bersama Maylani Putri Gunavy mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Lady Famulia Fakultas mahasiswi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Indah Arifatul Ulfiyah mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Exfarani Amaliyah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Novi Hidayanti mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Risqi Andhani mahasiswi Fakultas Pertanian UNSOED, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Fitri Mei Saroh mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Umi Solikhah mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Sunan Kalijaga, pada 28 maret 2015.

Wawancara bersama Fifty Aryaningsih mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada 29 maret 2015.

J. Website

Heyes, Cressida, *Identity politics*. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy <<http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/>>.

Idham Putra, *Teori Identitas Sosial*, 2008. Idhamputra.wordpress.com.

Dwi Andi Susanto, “Banyak Pro-Kontra Setelah MUI Fatwa Haram Jilboobs”, dalam *Merdeka.com*. <http://www.merdeka.com/teknologi/banyak-pro-dan-kontra-setelah-mui-fatwa-haram-jilboobs.html>. diakses pada, 26 maret 2015.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB II			
1.	24	18	Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lampiran II

Bukti Wawancara dan Foto



Wawancara dengan Fhaviola, Mahasiswi UNY sekaligus model di Yogyakarta pada 30 maret 2015.



Wawancara dengan Lady dan Meylani, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 4 april 2015.



Kode etik pakaiana mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DAN FATWA MUI

1. Apa makna jilbab bagi anda?
2. Apa pandangan anda terhadap hijab syar'i?
3. Apa pandangan anda terhadap hijab modis?
4. Apa makna aurat bagi anda?
5. Apakah anda mengetahui adanya standarisasi penggunaan hijab syar'i (fatwa MUI)?
6. Apa respon anda terhadap fatwa MUI yang mengharamkan model jilbab yang masih menampilkan lekuk tubuh (*jilboobs*)?
7. Bagaimana anda mensiasati model berpakaian anda agar terkesan terlihat syar'i?
8. Seberapa jauh pengaruh modernisasi dalam perkembangan dunia jilbab di lingkungan anda?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Syarief Husyein
Tempat/Tgl. Lahir : Indragiri Hilir, 19 Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Bayas Jaya RT. 004 RW. 004 Desa Bayas Jaya,
Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau.
Ayah : S. Abdul Hamid
Ibu : Rodiyah
Saudara : Ika Fitriana
Alwi Sabah
Ahmad Syakur
Cp : 085729323644
E-mail : syarifhusen@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Al-Muhajirin, Bayas Jaya, Indragiri Hilir, Lulus 2004
2. MTS N Kebumen I, Kebumen, Lulus 2007
3. MA Khairul Ummah, Air Molek, Indragiri Hulu, Lulus 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-Sekarang